BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN

LAPORAN KINERJA



TRIWULAN III 2026

BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA IV

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Triwulan III Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera IV Tahun Anggaran 2026 dengan baik.

Dokumen Laporan Kinerja Triwulan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera IV memuat Latar Belakang, Tugas dan Fungsi, Struktur Organisasi, Target Kinerja, Capaian Target, Permasalahan atau Potensi Capaian Triwulan BP3KP Sumatera IV serta rencana tindak lanjut atas permasalahan pada triwulan sebelumnya. Laporan Kinerja Triwulan yang disusun oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera IV menggambarkan capaian terhadap 5 (lima) Unit Organisasi yaitu Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan, Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan, dan Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko.

Hasil dari Laporan Kinerja Triwulan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera IV ini selanjutnya akan menjadi masukan dalam penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2026 Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera IV. Akhir kata kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak atas tersajinya laporan ini. Untuk semua masukan dan koreksi akan kami jadikan perbaikan dalam penyusunan laporan pada periode selanjutnya.

Jambi, 01 Oktober 2026
Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan
dan Kawasan Permukiman Sumatera IV

KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA IV
DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN

Yenni Sovyan Mora, S.T., M.Si
NIP. 19810421 200812 2 002



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii
DAFTAR TABEL iv
DAFTAR GAMBAR v
BAB I PENDAHULUAN 2
1.1 Latar Belakang 2
1.2 Tugas Dan Fungsi 2
1.3 Struktur Organisasi 3
BAB II CAPAIAN KINERJA 7
2.1 Target Kinerja TW I /II / III/ IV 7
2.1.1 Target Kinerja DIPA Sekretariat Jenderal 8
2.1.2 Target Kinerja DIPA Ditjen. Kawasan Permukiman 9
2.1.3 Target Kinerja DIPA Ditjen. Perumahan Perdesaan 12
2.1.4 Target Kinerja DIPA Ditjen. Perumahan Perkotaan 16
2.1.5 Target Kinerja DIPA Ditjen. Tata Kelola dan Pengendalian Risiko 20
2.2 Metode Pengukuran Kinerja 22
2.3 Capaian Target Triwulan III 23
2.3.1 Capaian Target TW- III DIPA Sekretariat Jenderal 23
2.3.2 Capaian Target TW- III DIPA Ditjen Kawasan Permukiman 24
2.3.3 Capaian Target TW- III DIPA Ditjen Perumahan Perdesaan 27
2.3.4 Capaian Target TW- III DIPA Ditjen Perumahan Perkotaan 29
2.3.5 Capaian Target TW- III DIPA Ditjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko 32
2.4 Permasalahan / Faktor Keberhasilan 33
BAB III PENUTUP 39
3.1 RENCANA TINDAK LANJUT 39
LAMPIRAN vii

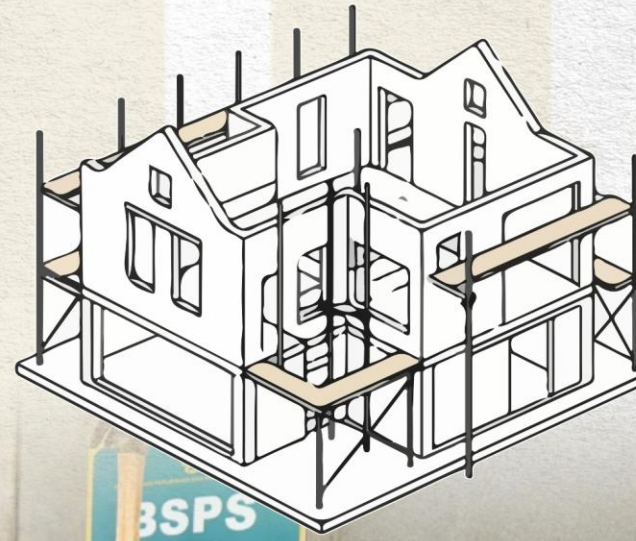
DAFTAR TABEL

Tabel 1.3. 1 Struktur Organisasi dan Tugas Jabatan 5
Tabel 2. 1 Daftar Kode Satker 7
Tabel 2.1.1. 1 Rincian Target Capaian TA 2026 BP3KP Sumatera IV (Sekretariat Jenderal) 8
Tabel 2.1.1. 2 Rincian Target Capaian TA 2026 BP3KP Sumatera IV (Sekretariat Jenderal) 9
Tabel 2.1.2. 1 Rincian Target Capaian TA 2026 BP3KP Sumatera IV (Ditjen. Kawasan Permukiman) 10
Tabel 2.1.2. 2 Rincian Target Capaian TA 2026 BP3KP Sumatera IV (Ditjen. Kawasan Permukiman) 11
Tabel 2.1.3. 1 Rincian Target Capaian TA 2026 BP3KP Sumatera IV (Ditjen. Perumahan Perdesaan) 12
Tabel 2.1.3. 2 Rincian Target Capaian TA 2026 BP3KP Sumatera IV (Ditjen. Perumahan Perdesaan) 14
Tabel 2.1.4. 1 Rincian Target Capaian TA 2026 BP3KP Sumatera IV (Ditjen. Perumahan Perkotaan) 16
Tabel 2.1.4. 2 Rincian Target Capaian TA 2026 BP3KP Sumatera IV (Ditjen. Perumahan Perkotaan) 18
Tabel 2.1.5. 1 Rincian Target Capaian TA 2026 BP3KP Sumatera IV (Ditjen. Tata Kelola dan Pengendalian Risiko) 21
Tabel 2.1.5. 2 Rincian Target Capaian TA 2026 BP3KP Sumatera IV (Ditjen. Tata Kelola dan Pengendalian Risiko) 22
Tabel 2.3.1. 1 Capaian Kinerja BP3KP Sumatera IV terhadap Target Sekretariat Jenderal 23
Tabel 2.3.2. 1 Capaian Kinerja BP3KP Sumatera IV terhadap Target Ditjen. Kawasan Permukiman 24
Tabel 2.3.3. 1 Capaian Kinerja BP3KP Sumatera IV terhadap Target Ditjen. Perumahan Perdesaan 27
Tabel 2.3.4. 1 Capaian Kinerja BP3KP Sumatera IV terhadap Target Ditjen. Perumahan Perkotaan 29
Tabel 2.3.5. 1 Capaian Kinerja BP3KP Sumatera IV terhadap Target Ditjen TKPR 32
Tabel 2.4. 1 Permasalahan BP3KP Sumatera IV pada Triwulan III 33
Tabel 3.1. 1 Rencana Tindak Lanjut BP3KP Sumatera IV pada Triwulan III 39

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.3. 1 Struktur Organisasi Lama 4
Gambar 1.3. 2 Struktur Organisasi Baru 4

BAB I
Pendahuluan





BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) serta dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai tujuan instansi, pemerintah telah mengeluarkan berbagai pandusan dan aturan yang menjadi dasar bagi pemerintah untuk melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pembangunan.

Laporan Kinerja Triwulan menyajikan ringkasan pencapaian Kinerja entitas Akuntabilitas Kinerja dalam kurun waktu tiga bulan dari 5 (Lima) DIPA yang terdapat pada BP3KP Sumatera IV yaitu DIPA Sekretaris Jenderal, DIPA Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman, DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan, DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan dan DIPA Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko. Laporan Kinerja Triwulan disusun berdasarkan rencana kerja dan anggaran yang telah ditetapkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran dan pencapaian tujuan yang telah direncanakan. Laporan Kinerja Triwulan mencakup tentang:

1. Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Program/Indikator Kinerja Kegiatan/Indikator Kinerja Triwulan;
2. Capaian (realisasi) target Indikator Kinerja Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Sasaran Triwulan;
3. Deviasi antara target dan realisasi kinerja serta alternatif solusi;
4. Permasalahan, tindak lanjut, dan bukti tindak lanjut; dan
5. Dokumentasi pelaksanaan pekerjaan yang mendukung pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Sasaran.

Capaian target kinerja pada Laporan Kinerja Triwulan digunakan sebagai masukan dalam penetapan capaian kinerja organisasi dan digunakan sebagai dasar perhitungan kinerja periodik pegawai.

1.2 Tugas Dan Fungsi

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) dengan tugas melaksanakan penyediaan perumahan, peningkatan kualitas perumahan, pengembangan kawasan permukiman, penataan kawasan permukiman pasca bencana dan kerusuhan sosial, dan fasilitasi serah terima aset. Dalam menjalankan tugasnya BP3KP Sumatera IV menjalankan fungsi:

1. Penyusunan program dan anggaran pelaksanaan pengembangan kawasan permukiman, pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;

2. Penyusunan rencana teknis pengembangan kawasan permukiman, pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
3. Pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
4. Pelaksanaan dan koordinasi pengawasan dan pengendalian teknis pengembangan kawasan permukiman, pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
5. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
6. Pengelolaan data dan informasi perumahan dan kawasan permukiman;
7. Pelaksanaan koordinasi dan dukungan penataan kawasan permukiman pasca bencana dan kerusuhan sosial;
8. Pelaksanaan koordinasi penyediaan lahan dan pengembangan hunian;
9. Pelaksanaan koordinasi pemanfaatan dan penghunian perumahan;
10. Pelaksanaan fasilitasi bina usaha dan perlindungan konsumen perumahan;
11. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi forum perumahan dan kawasan permukiman;
12. Pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan koordinasi fasilitasi pembiayaan perumahan;
13. Pelaksanaan fasilitasi serah terima aset;
14. Pelaksanaan dan koordinasi reformasi birokrasi, pembangunan zona integritas, sistem pengendalian intern, sistem manajemen risiko, serta sistem pengendalian anti korupsi dan penyuapan; dan
15. Pelaksanaan urusan tata usaha, umum dan rumah tangga, komunikasi publik, serta layanan hukum balai.

1.3 Struktur Organisasi

Susunan Organisasi UPT, dalam hal ini Balai, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, yaitu terdiri dari :

a. Subbagian Umum dan Tata Usaha;
b. Seksi Pelaksanaan Wilayah I;
c. Seksi Pelaksanaan Wilayah II; dan
d. Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana

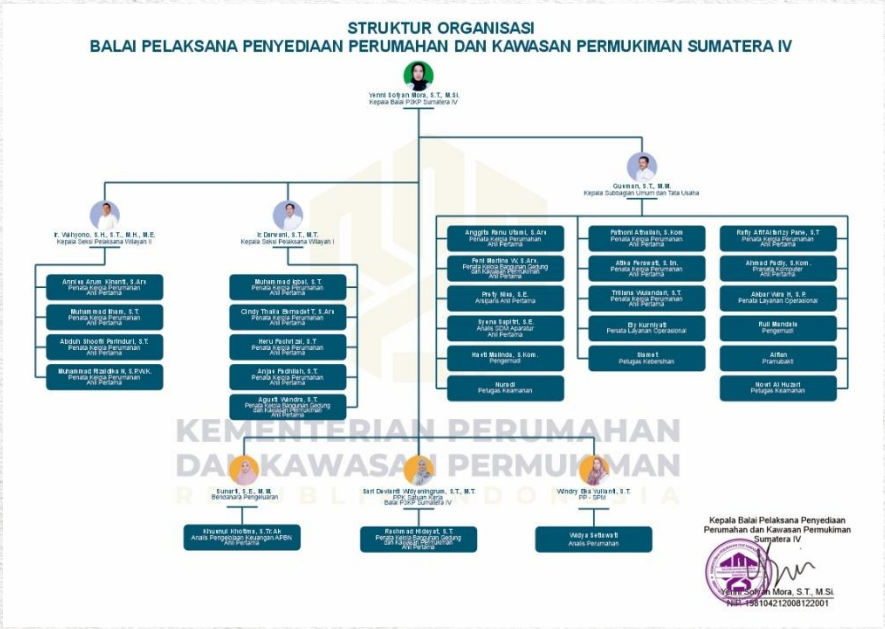
Berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal, Nomor 248/KPTS/Sj/2026 Tanggal 14 September 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam jabatan pengawas pada unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, terjadi perubahan Struktur Organisasi pada BP3KP Sumatera IV.

Semula:



Gambar 1.3. 1 Struktur Organisasi Lama

Menjadi:



Gambar 1.3. 2 Struktur Organisasi Baru

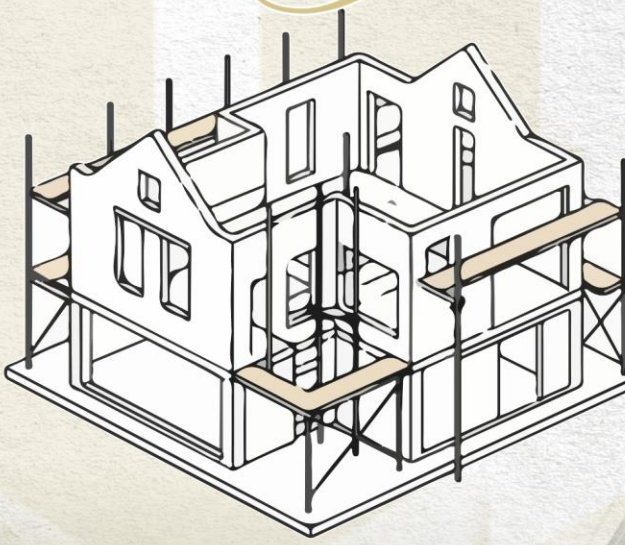
Struktur Organisasi dan Tugas Jabatan pada BP3KP Sumatera IV yaitu :

Tabel 1.3. 1 Struktur Organisasi dan Tugas Jabatan

No.	Jabatan	Tugas
1	Kepala Balai	a. Penanggung jawab utama atas seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi BP3KP di wilayah kerja Sumatera IV.
2	Subbagian Umum dan Tata Usaha	a. Melakukan penyusunan program dan anggaran, b. Melakukan pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, dan administrasi sumber daya manusia, c. Melakukan pengelolaan dan pelaporan administrasi keuangan, d. Melakukan pelaksanaan dan koordinasi reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas, e. Melakukan koordinasi administrasi pelaksanaan sistem pengendalian intern dan penerapan manajemen risiko, komunikasi publik, serta layanan hukum balai.
3	Seksi Pelaksanaan Wilayah I	a. Melakukan penyiapan pelaksanaan dan koordinasi penyusunan rencana teknis pengembangan kawasan permukiman, pembinaan usaha dan perlindungan konsumen, serta koordinasi dan penataan kawasan permukiman pasca bencana dan kerusuhan sosial; dan b. Melakukan koordinasi penyediaan lahan, pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kualitas rumah dan prasarana, sarana, dan utilitas umum, fasilitasi penghunian, pengawasan dan pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, verifikasi data, pada wilayah pesisir sesuai dengan Keputusan Menteri mengenai delineasi perkotaan, perdesaan, dan pesisir.
4	Seksi Pelaksanaan Wilayah II	Melakukan penyiapan pelaksanaan dan koordinasi penyusunan rencana teknis perumahan, koordinasi penyediaan lahan, pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kualitas rumah dan prasarana, sarana, dan utilitas umum, fasilitasi penghunian, pengawasan dan pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, verifikasi data pada wilayah perkotaan dan perdesaan sesuai dengan Keputusan Menteri mengenai delineasi perkotaan, perdesaan, dan pesisir.
5	Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana	Memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Balai sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan

BAB II

Perencanan Kerja





BAB II
CAPAIAN KINERJA

Tahun 2026 Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera IV memiliki 5 (lima) DIPA yaitu DIPA Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan, Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan, Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko. Sedangkan Satker PKP Provinsi Bengkulu dan Satker PKP Provinsi Jambi memiliki 4 (empat) DIPA yang sama dengan Balai kecuali DIPA Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko. Rincian Kode Satker tiap DIPA dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 1 Daftar Kode Satker

BALAI / SATKER	KODE SATKER / DIPA				
	SEKJEN	DITJEN KP	DITJEN PERDESAAN	DITJEN PERKOTAAN	DITJEN TKPR
BP3KP SUMATERA IV	691387	691441	691495	691549	691598
SATKER PKP PROVINSI BENGKULU	691389	691443	691497	691551	
SATKER PKP PROVINSI JAMBI	691388	691442	691496	691550	

Sumber: Analisis BP3KP Sum IV

2.1 Target Kinerja TW I /II / III/ IV

Target Kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera IV yang tertuang di dalam Dokumen Rencana Aksi Revisi Tahun 2026 merupakan gabungan target kinerja untuk BP3KP Sumatera IV, Satker PKP Provinsi Bengkulu dan Satker PKP Provinsi Jambi, dimana terdapat Target Kinerja terhadap 5 (Lima) DIPA Unit Organisasi yaitu Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan, Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan dan Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko. Terdapat perubahan pada Target Kinerja BP3KP Sumatera IV di Triwulan II dan Triwulan III dikarenakan terjadi revisi DIPA untuk masing-masing UNOR yang mengakibatkan perubahan Rencana Penarikan Dana. Berikut penjelasan mengenai Target Kinerja Tahun 2026:

2.1.1 Target Kinerja DIPA Sekretariat Jenderal

Target Kinerja BP3KP Sumatera IV pada DIPA Sekretariat Jenderal di Triwulan III Tahun 2026 merujuk pada Rencana Penarikan Dana dari hasil POK Revisi 7 DIPA Sekretariat Jenderal pada tanggal 7 Juli 2026, dengan rincian dapat dilihat pada tabel berikut:

Semula:

Tabel 2.1.1. 1 Rincian Target Capaian TA 2026 BP3KP Sumatera IV (Sekretariat Jenderal)

No		Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator / KRO / RO		Satuan	Target PK	Anggaran (Rp x 1.000)	Target TW-I	Target TW-II	Target TW-III	Target TW-IV
UNOR : SEKRETARIAT JENDERAL						**2.000.191**	**26,47%**	**57,42%**	**75,98%**	**99,06%**
PROGRAM : DUKUNGAN MANAJEMEN						**2.000.191**	**26,47%**	**57,42%**	**75,98%**	**99,06%**
SK : Meningkatnya layanan dukungan manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera IV										
IKK : Jumlah Layanan Umum										
1	KRO	7665.EBA	Layanan Dukungan manajemen Internal							
	RO	EBA.962	Layanan Umum	Layanan	3	69.798	89,61%	91,32%	92,82%	98,18%
			Balai P3KP Sumatera IV	Layanan	1	35.994	96,79%	96,79%	96,69%	100,00%
			Satker PKP Prov. Bengkulu	Layanan	1	14.960	60,00%	68,00%	75,00%	100,00%
			Satker PKP Prov. Jambi	Layanan	1	18.844	93,26%	93,26%	93,26%	93,26%
IKK : Jumlah Layanan Perkantoran										
2	KRO	7665.EBA	Layanan Dukungan manajemen Internal							
	RO	EBA.994	Layanan Perkantoran	Layanan	3	1.722.316	24,09%	50,91%	72,40%	98,98%
			Balai P3KP Sumatera IV	Layanan	1	899.299	9,15%	38,65%	70,11%	100,00%
			Satker PKP Prov. Bengkulu	Layanan	1	438.808	28,00%	49,53%	64,00%	100,00%
			Satker PKP Prov. Jambi	Layanan	1	384.209	47,91%	62,44%	78,67%	95,45%
IKK : Jumlah Layanan Sarana Internal										
3	KRO	7665.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal							
	RO	EBB.951	Layanan Sarana Internal	Unit	42	208.077	24,99%	99,99%	99,99%	99,99%
			Balai P3KP Sumatera IV	Unit	40	104.039	0,00%	91,35%	100,00%	100,00%
			Satker PKP Prov. Bengkulu	Unit	1	52.019	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%
			Satker PKP Prov. Jambi	Unit	1	52.019	99,96%	99,96%	99,96%	99,96%

Menjadi:

Tabel 2.1.1. 2 Rincian Target Capaian TA 2026 BP3KP Sumatera IV
(Sekretariat Jenderal)

No	Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator / KRO / RO			SATUAN	TARGET PK	ANGGARAN	Target TW-I	Target TW-II	Target TW-III	Target TW-IV
UNOR : SEKRETARIAT JENDERAL						**2,089,191,000**	**25.27%**	**47.20%**	**71.91%**	**99.02%**
PROGRAM : DUKUNGAN MANAJEMEN						**2,089,191,000**	**25.27%**	**47.20%**	**71.91%**	**99.02%**
SK : Meningkatnya layanan dukungan manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera IV										
IKK : Jumlah Layanan Umum										
1	KRO	7665.EBA	Layanan Dukungan manajemen Internal							
	RO	EBA.962	Layanan Umum	Layanan	3	69,798,000	87.88%	89.60%	91.10%	98.11%
			Balai P3KP Sumatera IV	Layanan	1	35,994,000	96.79%	96.79%	96.79%	100.00%
			Satker PKP Prov. Bengkulu	Layanan	1	14,960,000	60.00%	68.00%	75.00%	100.00%
			Satker PKP Prov. Jambi	Layanan	1	18,844,000	93.00%	93.00%	93.00%	93.00%
IKK : Jumlah Layanan Perkantoran										
2	KRO	7665.EBA	Layanan Dukungan manajemen Internal							
	RO	EBA.994	Layanan Perkantoran	Layanan	3	1,811,316,000	22.88%	40.78%	67.99%	98.94%
			Balai P3KP Sumatera IV	Layanan	1	899,299,000	9.15%	26.57%	65.69%	100.00%
			Satker PKP Prov. Bengkulu	Layanan	1	527,808,000	28.00%	49.53%	63.90%	100.00%
			Satker PKP Prov. Jambi	Layanan	1	384,209,000	48.00%	62.00%	79.00%	95.00%
IKK : Jumlah Layanan Sarana Internal										
3	KRO	7665.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal							
	RO	01. EBB.951	Layanan Sarana Internal	Unit	42	208,077,000	25.00%	88.85%	99.56%	100.00%
			Balai P3KP Sumatera IV	Unit	40	104,039,000	0.00%	77.70%	99.12%	100.00%
			Satker PKP Prov. Bengkulu	Unit	1	52,019,000	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%
			Satker PKP Prov. Jambi	Unit	1	52,019,000	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

2.1.2 Target Kinerja DIPA Ditjen. Kawasan Permukiman

Target Kinerja BP3KP Sumatera IV pada DIPA Ditjen. Kawasan Permukiman di Triwulan III Tahun 2026 merujuk pada Rencana Penarikan Dana dari hasil POK Revisi 9 DIPA Ditjen Kawasan Permukiman pada tanggal 23 September 2026, dengan rincian dapat dilihat pada tabel berikut:

Semula:

Tabel 2.1.2. 1 Rincian Target Capaian TA 2026 BP3KP Sumatera IV
(Ditjen. Kawasan Permukiman)

No		Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator / KRO / RO	Satuan	Target PK	Anggaran (Rp x 1.000)	Target TW-I	Target TW-II	Target TW-III	Target TW-IV
UNOR : DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN					**40.514.293**	**0,57%**	**38,57%**	**79,00%**	**100,00%**
PROGRAM : PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					**40.412.139**	**0,52%**	**38,54%**	**79,00%**	**100,00%**
SK : Terselenggaranya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam mendukung penyediaan rumah layak huni									
IKK : Jumlah Dokumen Data dan Informasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman									
1	KRO	7659.BMA	Data dan Informasi Publik						
	RO	BMA.001	Data dan Informasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Dokumen	1	15.827	42,26%	99,12%	99,12%	100%
			Balai P3KP Sumatera IV	Layanan	1	15.827	42,26%	99,12%	99,12%	100%
IKK : Jumlah Laporan Penyusunan Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman									
1	KRO	7659.PBF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana						
	RO	PBF.001	Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Dokumen	1	61.103	0,00%	38,94%	73,02%	100%
			Balai P3KP Sumatera IV	Dokumen	1	61.103	0,00%	38,94%	73,02%	100%
SK : Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni di kawasan permukiman									
IKK : Jumlah Dokumen Teknis Penyiapan Penanganan Kumuh dan Pengembangan Kawasan Permukiman									
1	KRO	7659.CBR	Dukungan Teknis						
	RO	CBR.002	Dukungan Teknis Penyiapan Penanganan Kumuh dan Pengenbangan Kawasan Permukiman	Dokumen	1	96.406	27,88%	49,02%	73,36%	100%
			Balai P3KP Sumatera IV	Dokumen	1	96.406	27,88%	49,02%	73,36%	100%
IKK : Jumlah Unit Rumah Swadaya melalui Peningkatan Kualitas									
1	KRO	7659.CBR	Dukungan Teknis						
	RO	CBR.002	Dukungan Teknis Penyiapan Penanganan Kumuh dan Pengenbangan Kawasan Permukiman	Unit	1.800	40.238.803	0,43%	38,49%	79,02%	100%
			Satker PKP Prov. Bengkulu	Unit	1.500	33.571.298	0%	27,66%	75,53%	100%
			Satker PKP Prov. Jambi	Unit	300	6.667.505	0%	93,00%	96,58%	100%
PROGRAM : DUKUNGAN MANAJEMEN					**102.154**	**22,14%**	**50,92%**	**76,11%**	**100%**
SK : Meningkatnya layanan dukungan manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman									
IKK : Jumlah Layanan Umum									
1	KRO	7674.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal						
	RO	EBA.962	Layanan Umum	Layanan	3	94.508	23,93%	53,60%	75,76%	100%
			Balai P3KP Sumatera IV	Layanan	1	13.357	39,02%	85,28%	85,28%	100%
			Satker PKP Prov. Bengkulu	Layanan	1	45.812	38,00%	60,00%	80,00%	100%
			Satker PKP Prov. Jambi	Layanan	1	35.339	0,00%	33,33%	66,67%	100%
	RO	EBA.963	Jumlah Data dan Informasi	Layanan	1	1.657	0%	82,08%	82,08%	100%
			Balai P3KP Sumatera IV	Layanan	1	1.657	0%	82,08%	82,08%	100%
	RO	EBA.956	Jumlah Layanan BMN	Layanan	1	5.989	0%	0%	79,96%	100%

No	Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator / KRO / RO	Satuan	Target PK	Anggaran (Rp x 1.000)	Target TW-I	Target TW-II	Target TW-III	Target TW-IV
	Balai P3KP Sumatera IV	Layanan	1	5.989	0%	0%	79,96%	100%

Menjadi:

Tabel 2.1.2. 2 Rincian Target Capaian TA 2026 BP3KP Sumatera IV
(Ditjen. Kawasan Permukiman)

No		Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator / KRO / RO		SATUAN	TARGET PK	ANGGARAN	Target TW-I	Target TW-II	Target TW-III	Target TW-IV
UNOR : DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN						**50,444,763,000**	**0.39%**	**29.87%**	**75.00%**	**100.00%**
PROGRAM : PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						**50,348,708,000**	**0.35%**	**29.86%**	**75.07%**	**100.00%**
SK : Terselenggaranya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam mendukung penyediaan rumah layak huni										
IKK : Jumlah Dokumen Data dan Informasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman										
1	KRO	7659.BMA	Data dan Informasi Publik							
	RO	BMA.001	Data dan Informasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Dokumen	1	15,827,000	42.26%	42.26%	99.27%	100.00%
			Balai P3KP Sumatera IV	Dokumen	1	15,827,000	42.26%	42.26%	99.27%	100.00%
IKK : Jumlah Laporan Penyusunan Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman										
1	KRO	7659.PBF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana							
	RO	PBF.001	Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Dokumen	1	61,103,000	0.00%	41.55%	63.00%	100.00%
			Balai P3KP Sumatera IV	Dokumen	1	61,103,000	0.00%	41.55%	63.00%	100.00%
SK : Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni di kawasan permukiman										
IKK : Jumlah Dokumen Teknis Penyiapan Penanganan Kumuh dan Pengembangan Kawasan Permukiman										
1	KRO	7659.CBR	Dukungan Teknis							
	RO	CBR.002	Dukungan Teknis Penyiapan Penanganan Kumuh dan Pengenbangan Kawasan Permukiman	Dokumen	1	96,406,000	27.88%	55.23%	80.71%	100.00%
			Balai P3KP Sumatera IV	Dokumen	1	96,406,000	27.88%	55.23%	80.71%	100.00%
IKK : Jumlah Unit Rumah Swadaya melalui Peningkatan Kualitas										
1	KRO	7659.RBB	Prasarana Bidang Perumahan dan Permukiman							
	RO	RBB.008	Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di Kawasan Permukiman	Unit	1,930	41,480,346,000	0.34%	35.72%	80.22%	100.00%
			Satker PKP Prov. Bengkulu	Unit	1,543	33,192,720,000	0.43%	27.66%	75.53%	100.00%
			Satker PKP Prov. Jambi	Unit	387	8,287,626,000	0.00%	68.00%	99.00%	100.00%
IKK : Jumlah Unit Rumah yang Memiliki Akses Sanitasi Layak (PK)										
1	KRO	7659.RBB	Prasarana Bidang Perumahan dan Permukiman							
	RO	RBB.007	Rumah Bersanitasi Layak	Unit	200	2,001,067,000	0.00%	0.00%	52.00%	100.00%
			Satker PKP Prov. Jambi	Unit	200	2,001,067,000	0.00%	0.00%	52.00%	100.00%

No		Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator / KRO / RO		SATUAN	TARGET PK	ANGGARAN	Target TW-I	Target TW-II	Target TW-III	Target TW-IV
SK : Meningkatnya luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu										
IKK : Luas Permukiman Kumuh yang Ditangani secara Terpadu										
1	KRO	7659.RBB	Prasarana Bidang Perumahan dan Permukiman							
	RO	RBB.006	Penanganan Permukiman Kumuh	Hektar	18.13	6,693,959,000	0.00%	2.00%	50.00%	100.00%
			Satker PKP Prov. Jambi	Hektar	18.13	6,693,959,000	0.00%	2.00%	50.00%	100.00%
PROGRAM : DUKUNGAN MANAJEMEN				**Layanan**	**5**	**96,055,000**	**23.55%**	**31.40%**	**38.58%**	**100.00%**
SK : Meningkatnya layanan dukungan manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman										
IKK : Jumlah Layanan Umum										
1	KRO	7674.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal							
	RO	EBA.962	Layanan Umum	Layanan	3	88,409,000	25.59%	32.58%	40.37%	100.00%
			Balai P3KP Sumatera IV	Layanan	1	13,357,000	39.02%	85.29%	89.78%	100.00%
			Satker PKP Prov. Bengkulu	Layanan	1	45,812,000	38.00%	38.00%	51.74%	100.00%
			Satker PKP Prov. Jambi	Layanan	1	29,240,000	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
	RO	EBA.963	Jumlah Data dan Informasi	Layanan	1	1,657,000	0.00%	82.08%	82.08%	100.00%
			Balai P3KP Sumatera IV	Layanan	1	1,657,000	0.00%	82.08%	82.08%	100.00%
	RO	EBA.956	Jumlah Layanan BMN	Layanan	1	5,989,000	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
			Balai P3KP Sumatera IV	Layanan	1	5,989,000	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%

2.1.3 Target Kinerja DIPA Ditjen. Perumahan Perdesaan

Target Kinerja BP3KP Sumatera IV pada DIPA Ditjen. Perumahan Perdesaan di Triwulan III Tahun 2026 merujuk pada Rencana Penarikan Dana dari hasil POK Revisi 6 DIPA Ditjen Perumahan Perdesaan pada tanggal 7 Juli 2026, dengan rincian dapat dilihat pada tabel berikut:

Semula:

Tabel 2.1.3. 1 Rincian Target Capaian TA 2026 BP3KP Sumatera IV (Ditjen. Perumahan Perdesaan)

No		Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator / KRO / RO		Satuan	Target PK	Anggaran (Rp x 1.000)	Target TW-I	Target TW-II	Target TW-III	Target TW-IV
UNOR : DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN						**85.814.977**	**0,33%**	**64,22%**	**78,50%**	**100,00%**
PROGRAM : PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						**85.795.193**	**0,33%**	**64,22%**	**78,50%**	**100,00%**
SK : Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, dan pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan perumahan perdesaan										
IKK : Jumlah Rekomendasi Kebijakan, Kemitraan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan										
1	KRO	7660.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana							
	RO	ABF.009	Kebijakan, Kemitraan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	Rekomendasi Kebijakan	1	91.778	0,00%	43,80%	43,80%	100,00%
			Balai P3KP Sumatera IV	Rekomendasi Kebijakan	1	91.778	0,00%	43,80%	43,80%	100,00%

No		Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator / KRO / RO	Satuan	Target PK	Anggaran (Rp x 1.000)	Target TW-I	Target TW-II	Target TW-III	Target TW-IV
IKK : Jumlah Dokumen Data dan Informasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan									
1	KRO	7660.BMA Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana							
	RO	BMA.001 Data dan Informasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	Dokumen	1	30.766	0,00%	74,23%	74,23%	100,00%
		Balai P3KP Sumatera IV	Dokumen	1	30.766	0,00%	74,23%	74,23%	100,00%
IKK : Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan									
1	KRO	7660.FAE Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan							
	RO	FAE.001 Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perdesaan	Laporan	2	125.456	43,52%	58,50%	73,25%	100,00%
		Satker PKP Prov. Bengkulu	Laporan	1	60.181	29,54%	45,00%	60,00%	100,00%
		Satker PKP Prov. Jambi	Laporan	1	65.275	56,41%	70,94%	85,47%	100,00%
SK : Meningkatnya ketersediaan rumah baru layak huni di perdesaan									
IKK : Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan									
1	KRO	7660.ABF Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana							
	RO	ABF.007 Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perdesaan	Rekomendasi Kebijakan	1	8.347	12,22%	28,51%	89,61%	100,00%
		Balai P3KP Sumatera IV	Rekomendasi Kebijakan	1	8.347	12,22%	28,51%	89,61%	100,00%
IKK : Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perdesaan									
1	KRO	7660.FAE Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan							
	RO	FAE.004 Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perdesaan	Laporan	1	6.508	0,00%	31,35%	68,22%	100,00%
		Balai P3KP Sumatera IV	Laporan	1	6.508	0,00%	31,35%	68,22%	100,00%
IKK : Jumlah Rumah Khusus Perumahan Perdesaan									
1	KRO	7660.RBB Prasarana Bidang Perumahan dan Permukiman							
	RO	RBB.002 Rumah Khusus Perumahan Perdesaan	Unit	20	6.889.491	0,00%	0,00%	41,93%	100,00%
		Satker PKP Prov. Jambi	Unit	20	6.889.491	0,00%	0,00%	41,93%	100,00%
SK : Meningkatnya penyediaan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas dan pembangunan perumahan di wilayah perdesaan									
IKK : Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan									
1	KRO	7660.ABF Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana							
	RO	ABF.008 Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan	Rekomendasi Kebijakan	1	38.080	41,57%	67,66%	84,76%	100,00%
		Balai P3KP Sumatera IV	Rekomendasi Kebijakan	1	38.080	41,57%	67,66%	84,76%	100,00%
IKK : Jumlah Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di Perdesaan									
1	KRO	7660.RBB Prasarana Bidang Perumahan dan Permukiman							
	RO	RBB.008 Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di Perdesaan	Unit	3600	78.604.767	0,27%	69,88%	81,75%	100,00%
		Satker PKP Prov. Bengkulu	Unit	1200	26.266.951	0,70%	20,81%	50,86%	100,00%

No		Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator / KRO / RO		Satuan	Target PK	Anggaran (Rp x 1.000)	Target TW-I	Target TW-II	Target TW-III	Target TW-IV
			Satker PKP Prov. Jambi	Unit	2400	52.337.816	0,06%	94,51%	97,26%	100,00%
PROGRAM : DUKUNGAN MANAJEMEN						**19.784**	**0,00%**	**50,84%**	**87,07%**	**100,00%**
SK : Meningkatnya layanan dukungan manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan										
IKK : Jumlah Layanan Umum										
1	KRO	7675.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal							
	RO	EBA.962	Layanan Umum	Layanan	3	18.061	0,00%	55,69%	85,84%	100,00%
			Balai P3KP Sumatera IV	Layanan	1	2.888	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
			Satker PKP Prov. Bengkulu	Layanan	1	7.500	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%
			Satker PKP Prov. Jambi	Layanan	1	7.673	0,00%	33,33%	66,67%	100,00%
SK : Meningkatnya layanan dukungan manajemen Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan										
IKK : Jumlah Layanan Data dan Informasi										
1	KRO	7675.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal							
	RO	EBA.963	Layanan Data dan Informasi	Layanan	1	1.723	0%	0%	100%	100%
			Balai P3KP Sumatera IV	Layanan	1	1.723	0%	0%	100%	100%

Menjadi:

Tabel 2.1.3. 2 Rincian Target Capaian TA 2026 BP3KP Sumatera IV
(Ditjen. Perumahan Perdesaan)

No		Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator / KRO / RO		SATUAN	TARGET PK	ANGGARAN	Target TW-I	Target TW-II	Target TW-III	Target TW-IV
UNOR : DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN						**111,335,789,000**	**0.25%**	**28.14%**	**74.70%**	**100.00%**
PROGRAM : PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						**111,326,475,000**	**0.25%**	**28.14%**	**74.70%**	**100.00%**
SK : Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, dan pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan perumahan perdesaan										
IKK : Jumlah Rekomendasi Kebijakan, Kemitraan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan										
1	KRO	7660.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana							
	RO	ABF.009	Kebijakan, Kemitraan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	Rekomendasi Kebijakan	1	91,778,000	0.00%	37.72%	37.72%	100.00%
			Balai P3KP Sumatera IV	Rekomendasi Kebijakan	1	91,778,000	0.00%	37.72%	37.72%	100.00%
IKK : Jumlah Dokumen Data dan Informasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan										
1	KRO	7660.BMA	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana							
	RO	BMA.001	Data dan Informasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	Dokumen	1	30,766,000	46.60%	51.90%	68.96%	100.00%
			Balai P3KP Sumatera IV	Dokumen	1	30,766,000	46.60%	51.90%	68.96%	100.00%
IKK : Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan										

No		Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator / KRO / RO		SATUAN	TARGET PK	ANGGARAN	Target TW-I	Target TW-II	Target TW-III	Target TW-IV
1	KRO	7660.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan							
	RO	FAE.001	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perdesaan	Laporan	2	90,016,000	48.37%	64.16%	69.89%	100.00%
			Satker PKP Prov. Bengkulu	Laporan	1	34,381,000	29.54%	45.00%	60.00%	100.00%
			Satker PKP Prov. Jambi	Laporan	1	55,635,000	60.00%	76.00%	76.00%	100.00%
SK : Meningkatnya ketersediaan rumah baru layak huni di perdesaan										
IKK : Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan										
1	KRO	7660.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana							
	RO	ABF.007	Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perdesaan	Rekomendasi Kebijakan	1	8,347,000	12.22%	36.90%	36.90%	100.00%
			Balai P3KP Sumatera IV	Rekomendasi Kebijakan	1	8,347,000	12.22%	36.90%	36.90%	100.00%
IKK : Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perdesaan										
1	KRO	7660.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan							
	RO	FAE.004	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perdesaan	Laporan	1	6,508,000	0.00%	31.35%	31.35%	100.00%
			Balai P3KP Sumatera IV	Laporan	1	6,508,000	0.00%	31.35%	31.35%	100.00%
IKK : Jumlah Rumah Khusus Perumahan Perdesaan										
1	KRO	7660.RBB	Prasarana Bidang Perumahan dan Permukiman							
	RO	RBB.002	Rumah Khusus Perumahan Perdesaan	Unit	48	15,900,516,000	0.00%	1.00%	24.00%	78.00%
			Satker PKP Prov. Jambi	Unit	48	15,900,516,000	0.00%	1.00%	24.00%	78.00%
SK : Meningkatnya penyediaan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas dan pembangunan perumahan di wilayah perdesaan										
IKK : Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan										
1	KRO	7660.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana							
	RO	ABF.008	Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan	Rekomendasi Kebijakan	1	38,080,000	41.57%	50.50%	79.95%	100.00%
			Balai P3KP Sumatera IV	Rekomendasi Kebijakan	1	38,080,000	41.57%	50.50%	79.95%	100.00%
IKK : Jumlah Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di Perdesaan										
1	KRO	7660.RBB	Prasarana Bidang Perumahan dan Permukiman							
	RO	RBB.008	Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di Perdesaan	Unit	4393	95,160,464,000	0.22%	32.61%	83.22%	100.00%
			Satker PKP Prov. Bengkulu	Unit	1381	29,832,739,000	0.70%	20.81%	50.86%	100.00%
			Satker PKP Prov. Jambi	Unit	3012	65,327,725,000	0.00%	38.00%	98.00%	100.00%
PROGRAM : DUKUNGAN MANAJEMEN				**Layanan**	**4**	**9,314,000**	**0.00%**	**24.16%**	**73.66%**	**100.00%**
SK : Meningkatnya layanan dukungan manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan										
IKK : Jumlah Layanan Umum										

No		Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator / KRO / RO		SATUAN	TARGET PK	ANGGARAN	Target TW-I	Target TW-II	Target TW-III	Target TW-IV
1	KRO	7675.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal							
	RO	EBA.962	Layanan Umum	Layanan	3	7,591,000	0.00%	29.64%	67.69%	100.00%
			Balai P3KP Sumatera IV	Layanan	1	2,888,000	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%
			Satker PKP Prov. Bengkulu	Layanan	1	2,250,000	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%
			Satker PKP Prov. Jambi	Layanan	1	2,453,000	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
SK : Meningkatnya layanan dukungan manajemen Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan										
IKK : Jumlah Layanan Data dan Informasi										
1	KRO	7675.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal							
	RO	EBA.963	Layanan Data dan Informasi	Layanan	1	1,723,000	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%
			Balai P3KP Sumatera IV	Layanan	1	1,723,000	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%

2.1.4 Target Kinerja DIPA Ditjen. Perumahan Perkotaan

Target Kinerja BP3KP Sumatera IV pada DIPA Ditjen. Perumahan Perkotaan di Triwulan III Tahun 2026 merujuk pada Rencana Penarikan Dana dari hasil POK Revisi 6 DIPA Ditjen Perumahan Perkotaan pada tanggal 7 Juli 2026, dengan rincian dapat dilihat pada tabel berikut:

Semula:

Tabel 2.1.4. 1 Rincian Target Capaian TA 2026 BP3KP Sumatera IV (Ditjen. Perumahan Perkotaan)

No		Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator / KRO / RO		Satuan	Target PK	Anggaran (Rp x 1.000)	Target TW-I	Target TW-II	Target TW-III	Target TW-IV
UNOR : DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN						**28.296.083**	**8,92%**	**71,93%**	**84,52%**	**99,77%**
PROGRAM : PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						**28.230.822**	**8,93%**	**72,03%**	**84,54%**	**99,76%**
SK : Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan perumahan perkotaan										
IKK : Jumlah Rekomendasi Kebijakan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan										
1	KRO	7661.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana							
	RO	ABF.001	Kebijakan, Kemitraan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	1	48.528	0,00%	62,35%	62,35%	100%
			Balai P3KP Sumatera IV	Rekomendasi Kebijakan	1	48.528	0,00%	62,35%	62,35%	100%
IKK : Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan										
1	KRO	7661.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan							

No		Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator / KRO / RO		Satuan	Target PK	Anggaran (Rp x 1.000)	Target TW-I	Target TW-II	Target TW-III	Target TW-IV
	RO	FAE.001	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	Laporan	3	81.121	0,00%	31,37%	77,75%	100%
			Balai P3KP Sumatera IV	Laporan	1	24.913	0,00%	36,36%	98,97%	100%
			Satker PKP Prov. Bengkulu	Laporan	1	28.186	0,00%	25,00%	70,00%	100%
			Satker PKP Prov. Jambi	Laporan	1	28.022	0,00%	33,34%	66,69%	100%
SK : Meningkatnya Akses Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perkotaan										
IKK : Jumlah Kebijakan Penyelenggaraan Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perkotaan										
1	KRO	7661.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana							
	RO	ABF.002	Kebijakan Penyelenggaraan Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	1	26.453	0,00%	36,60%	73,20%	100%
			Balai P3KP Sumatera IV	Rekomendasi Kebijakan	1	26.453	0,00%	36,60%	73,20%	100%
SK : Meningkatnya Akses Rumah Tangga yang Terfasilitasi Pembiayaan Perumahan di Wilayah Perkotaan										
IKK : Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan Perkotaan										
1	KRO	7661.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana							
	RO	ABF.003	Kebijakan Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan Perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	1	23.969	0,00%	38,27%	76,54%	100%
			Balai P3KP Sumatera IV	Rekomendasi Kebijakan	1	23.969	0,00%	38,27%	76,54%	100%
SK : Meningkatnya Ketersediaan Rumah Baru Layak Huni di Perkotaan										
IKK : Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perkotaan										
1	KRO	7661.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana							
	RO	ABF.004	Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	1	37.681	0,00%	0,00%	50,84%	100%
			Balai P3KP Sumatera IV	Rekomendasi Kebijakan	1	37.681	0,00%	0,00%	50,84%	100%
IKK : Jumlah Unit Rumah Susun ASN/TNI/POLRI Perumahan Perkotaan										
1	KRO	7661.RBB	Prasarana Bidang Perumahan dan Permukiman							
	RO	RBB.003	Rumah Susun Hunian ASN/TNI/POLRI Perumahan Perkotaan	Unit	12	7.924.502	30,76%	81,93%	99,05%	99,14%
			Satker PKP Prov. Jambi	Unit	12	7.924.502	30,76%	81,93%	99,05%	99,14%
SK : Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni melalui Peningkatan Kualitas Pembangunan Perumahan di Wilayah Perkotaan										
IKK : Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan										
1	KRO	7661.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana							
	RO	ABF.005	Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	1	54.217	57,59%	77,02%	95,79%	100%
			Balai P3KP Sumatera IV	Rekomendasi Kebijakan	1	54.217	57,59%	77,02%	95,79%	100%
IKK : Jumlah Unit Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di Perkotaan										
1	KRO	7661.RBB	Prasarana Bidang Perumahan dan Permukiman							

No		Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator / KRO / RO		Satuan	Target PK	Anggaran (Rp x 1.000)	Target TW-I	Target TW-II	Target TW-III	Target TW-IV
	RO	RBB.008	Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di Perkotaan	Unit	900	20.034.351	0,27%	68,51%	78,94%	100%
			Satker PKP Prov. Bengkulu	Unit	300	6.941.717	0,54%	20,10%	44,74%	100%
			Satker PKP Prov. Jambi	Unit	600	13.092.634	0,12%	94,18%	97,07%	100%
PROGRAM : DUKUNGAN MANAJEMEN						**65.261**	**3,73%**	**30,01%**	**77,67%**	**106,13%**
SK : Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan										
IKK : Jumlah Layanan Umum										
1	KRO	7676.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal							
	RO	EBA.962	Layanan Umum	Layanan	3	39.175	6,21%	28,03%	69,15%	100%
			Balai P3KP Sumatera IV	Layanan	1	13.994	0,00%	37,24%	37,24%	100%
			Satker PKP Prov. Bengkulu	Layanan	1	12.836	0,00%	0,00%	100,00%	100%
			Satker PKP Prov. Jambi	Layanan	1	12.345	19,71%	46,74%	73,24%	100%
IKK : Jumlah Layanan Data dan Informasi										
1	KRO	7676.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal							
	RO	EBA.963	Layanan Data dan Informasi	Layanan	1	15.090	0,00%	57,00%	57,00%	100%
			Balai P3KP Sumatera IV	Layanan	1	15.090	0,00%	88,38%	99,98%	100%
IKK : Jumlah Layanan BMN										
1	KRO	7676.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal							
	RO	EBA.Z06	Layanan BMN	Layanan	1	10.996	0,00%	0,00%	100,00%	100%
			Balai P3KP Sumatera IV	Layanan	1	10.996	0,00%	0,00%	0,00%	100%

Menjadi:

Tabel 2.1.4. 2 Rincian Target Capaian TA 2026 BP3KP Sumatera IV
(Ditjen. Perumahan Perkotaan)

No		Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator / KRO / RO		SATUAN	TARGET PK	ANGGARAN	Target TW-I	Target TW-II	Target TW-III	Target TW-IV
UNOR : DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN						**64,492,497,000**	**0.28%**	**20.06%**	**29.15%**	**100.00%**
PROGRAM : PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						**64,437,373,000**	**0.26%**	**20.05%**	**29.11%**	**100.00%**
SK : Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan perumahan perkotaan										
IKK : Jumlah Rekomendasi Kebijakan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan										
1	KRO	7661.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana							
	RO	ABF.001	Kebijakan, Kemitraan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	1	65,034,000	21.92%	47.19%	47.19%	100.00%
			Balai P3KP Sumatera IV	Rekomendasi Kebijakan	1	65,034,000	21.92%	47.19%	47.19%	100.00%
IKK : Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan										

No		Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator / KRO / RO		SATUAN	TARGET PK	ANGGARAN	Target TW-I	Target TW-II	Target TW-III	Target TW-IV
1	KRO	7661.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan							
	RO	FAE.001	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	Laporan	3	51,221,000	0.38%	4.29%	58.52%	100.00%
			Balai P3KP Sumatera IV	Laporan	1	24,913,000	0.77%	0.77%	94.61%	100.00%
			Satker PKP Prov. Bengkulu	Laporan	1	6,288,000	0.00%	0.00%	70.00%	100.00%
			Satker PKP Prov. Jambi	Laporan	1	20,020,000	0.00%	10.00%	10.00%	100.00%
SK : Meningkatnya Akses Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perkotaan										
IKK : Jumlah Kebijakan Penyelenggaraan Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perkotaan										
1	KRO	7661.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana							
	RO	ABF.002	Kebijakan Penyelenggaraan Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	1	17,049,000	0.00%	64.82%	82.42%	100.00%
			Balai P3KP Sumatera IV	Rekomendasi Kebijakan	1	17,049,000	0.00%	64.82%	82.42%	100.00%
SK : Meningkatnya Akses Rumah Tangga yang Terfasilitasi Pembiayaan Perumahan di Wilayah Perkotaan										
IKK : Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan Perkotaan										
1	KRO	7661.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana							
	RO	ABF.003	Kebijakan Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan Perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	1	11,965,000	0.00%	19.06%	85.28%	100.00%
			Balai P3KP Sumatera IV	Rekomendasi Kebijakan	1	11,965,000	0.00%	19.06%	85.28%	100.00%
SK : Meningkatnya Ketersediaan Rumah Baru Layak Huni di Perkotaan										
IKK : Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perkotaan										
1	KRO	7661.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana							
	RO	ABF.004	Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	1	7,755,000	0.00%	1.93%	1.93%	100.00%
			Balai P3KP Sumatera IV	Rekomendasi Kebijakan	1	7,755,000	0.00%	1.93%	1.93%	100.00%
IKK : Jumlah Unit Rumah Susun ASN/TNI/POLRI Perumahan Perkotaan										
1	KRO	7661.RBB	Prasarana Bidang Perumahan dan Permukiman							
	RO	RBB.003	Rumah Susun Hunian ASN/TNI/POLRI Perumahan Perkotaan	Unit	12	7,924,502,000	0.00%	50.00%	100.00%	100.00%
			Satker PKP Prov. Jambi	Unit	12	7,924,502,000	0.00%	50.00%	100.00%	100.00%
SK : Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni melalui Peningkatan Kualitas Pembangunan Perumahan di Wilayah Perkotaan										
IKK : Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan										
1	KRO	7661.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana							

No		Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator / KRO / RO		SATUAN	TARGET PK	ANGGARAN	Target TW-I	Target TW-II	Target TW-III	Target TW-IV
	RO	ABF.005	Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	1	89,045,000	35.72%	45.89%	90.36%	100.00%
			Balai P3KP Sumatera IV	Rekomendasi Kebijakan	1	89,045,000	35.72%	45.89%	90.36%	100.00%
IKK : Jumlah Unit Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di Perkotaan										
1	KRO	7661.RBB	Prasarana Bidang Perumahan dan Permukiman							
	RO	RBB.008	Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di Perkotaan	Unit	2760	56,270,802,000	0.21%	15.76%	18.95%	100.00%
			Satker PKP Prov. Bengkulu	Unit	1075	21,882,074,000	0.54%	20.10%	25.17%	100.00%
			Satker PKP Prov. Jambi	Unit	1685	34,388,728,000	0.00%	13.00%	15.00%	100.00%
PROGRAM : DUKUNGAN MANAJEMEN				**Layanan**	**5**	**55,124,000**	**29.75%**	**37.57%**	**100.00%**	**100.00%**
SK : Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan										
IKK : Jumlah Layanan Umum										
1	KRO	7676.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal							
	RO	EBA.962	Layanan Umum	Layanan	3	29,038,000	30.72%	30.72%	69.08%	100.00%
			Balai P3KP Sumatera IV	Layanan	1	13,994,000	37.24%	37.24%	37.24%	100.00%
			Satker PKP Prov. Bengkulu	Layanan	1	11,140,000	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%
			Satker PKP Prov. Jambi	Layanan	1	3,904,000	95.00%	95.00%	95.00%	100.00%
IKK : Jumlah Layanan Data dan Informasi										
1	KRO	7676.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal							
	RO	EBA.963	Layanan Data dan Informasi	Layanan	1	13,339,000	56.06%	88.38%	100.00%	100.00%
			Balai P3KP Sumatera IV	Layanan	1	13,339,000	56.06%	88.38%	100.00%	100.00%
IKK : Jumlah Layanan BMN										
1	KRO	7676.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal							
	RO	EBA.Z06	Layanan BMN	Layanan	1	12,747,000	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
			Balai P3KP Sumatera IV	Layanan	1	12,747,000	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%

2.1.5 Target Kinerja DIPA Ditjen. Tata Kelola dan Pengendalian Risiko

Target Kinerja BP3KP Sumatera IV pada DIPA Ditjen. Tata Kelola dan Pengendalian Risiko di Triwulan III Tahun 2026 merujuk pada Rencana Penarikan Dana dari hasil POK Revisi 8 DIPA Ditjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko pada tanggal 17 September 2026, dengan rincian dapat dilihat pada table berikut:

Semula:

Tabel 2.1.5. 1 Rincian Target Capaian TA 2026 BP3KP Sumatera IV
(Ditjen. Tata Kelola dan Pengendalian Risiko)

No		Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator / KRO / RO		Satuan	Target PK	Anggaran (Rp x 1.000)	Target TW-I	Target TW-II	Target TW-III	Target TW-IV
UNOR : DIREKTORAT JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO						**85.546**	**0%**	**55,74%**	**82,49%**	**100,00%**
PROGRAM : PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN										
SK : Meningkatnya dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel										
IKK : Jumlah Rekomendasi Kebijakan Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas										
1	KRO	7662.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana							
	RO	ABF.004	Kebijakan Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas	Rekomendasi Kebijakan	1	15.339	0,00%	84,46%	96,72%	100,00%
			Balai P3KP Sumatera IV	Rekomendasi Kebijakan	1	15.339	0,00%	84,46%	96,72%	100,00%
SK : Meningkatnya dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman										
IKK : Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi										
1	KRO	7662.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana							
	RO	ABF.005	Kebijakan Manajemen Risiko dan Pencegarah Korupsi	Rekomendasi Kebijakan	1	58.253	0,00%	58,25%	80,43%	100,00%
			Balai P3KP Sumatera IV	Rekomendasi Kebijakan	1	58.253	0,00%	58,25%	80,43%	100,00%
SK : Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko perumahan dan kawasan permukiman										
IKK : Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko										
1	KRO	7662.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan							
	RO	FAE.001	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	Laporan	1	11.954	0,00%	6,69%	74,28%	100,00%
			Balai P3KP Sumatera IV	Laporan	1	11.954	0,00%	6,69%	74,28%	100,00%

Menjadi:

Tabel 2.1.5. 2 Rincian Target Capaian TA 2026 BP3KP Sumatera IV (Ditjen. Tata Kelola dan Pengendalian Risiko)

No		Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator / KRO / RO	SATUAN	TARGET PK	ANGGARAN	Target TW-I	Target TW-II	Target TW-III	Target TW-IV
UNOR : DIREKTORAT JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO					**79,894,000**	**0.00%**	**51.25%**	**77.73%**	**100.00%**
PROGRAM : PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					**79,894,000**	**0.00%**	**51.25%**	**77.73%**	**100.00%**
SK : Meningkatnya dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel									
IKK : Jumlah Rekomendasi Kebijakan Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas									
1	KRO	7662.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana						
	RO	ABF.004	Kebijakan Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas	Rekomendasi Kebijakan	1	15,339,000	0.00%	91.05%	94.83%	100.00%
			Balai P3KP Sumatera IV	Rekomendasi Kebijakan	1	15,339,000	0.00%	91.05%	94.83%	100.00%
SK : Meningkatnya dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman									
IKK : Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi									
1	KRO	7662.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana						
	RO	ABF.005	Kebijakan Manajemen Risiko dan Pencegarah Korupsi	Rekomendasi Kebijakan	2	52,601,000	0.00%	51.29%	71.96%	100.00%
			Balai P3KP Sumatera IV	Rekomendasi Kebijakan	2	52,601,000	0.00%	51.29%	71.96%	100.00%
SK : Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko perumahan dan kawasan permukiman									
IKK : Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko									
1	KRO	7662.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan						
	RO	FAE.001	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	Laporan	1	11,954,000	0.00%	0.00%	81.21%	100.00%
			Balai P3KP Sumatera IV	Laporan	1	11,954,000	0.00%	0.00%	81.21%	100.00%

2.2 Metode Pengukuran Kinerja

Metode pengukuran kinerja yang dilakukan melalui pendekatan berbasis hasil (*result based performance*) dengan mengacu pada Indikator Kinerja Kegiatan (IKU) yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategis. Pengukuran ini menitikberatkan pada capaian program pembangunan perumahan layak huni, peningkatan kualitas kawasan permukiman, serta penyediaan infrastruktur dasar yang berkelanjutan. Data kinerja dihimpun dari laporan pelaksanaan kegiatan, monitoring lapangan, serta evaluasi capaian fisik dan

keuangan. Selanjutnya, hasil pengukuran dibandingkan dengan target dalam perjanjian kinerja dan rencana kerja tahunan untuk menilai Tingkat efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program. Proses evaluasi juga melibatkan analisis dampak terhadap Masyarakat, seperti penurunan Kawasan kumuh dan peningkatan akses hunian layak sehingga dapat menjadi dasar dalam perbaikan kebijakan, peningkatan kualitas layanan, serta penguatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah secara berkelanjutan.

2.3 Capaian Target Triwulan III

Tahun Anggaran 2026, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera IV memiliki 18 (delapan belas) Sasaran Kegiatan yang terdiri dari 32 (tiga puluh dua) Indikator Kinerja Kegiatan, 32 (tiga puluh dua) Klasifikasi Kinerja Kegiatan dan 34 (tiga puluh empat) Paket / Rincian Output yang terbagi dalam Program Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Program Dukungan Manajemen. Adapun capaian kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera IV pada Triwulan III terhadap masing-masing Unit Organisasi adalah sebagai berikut:

2.3.1 Capaian Target TW- III DIPA Sekretariat Jenderal

Tabel 2.3.1. 1 Capaian Kinerja BP3KP Sumatera IV terhadap Target Sekretariat Jenderal

No		Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator / KRO / RO		SATUAN	TARGET PK	ANGGARAN	TARGET TW III		REALISASI TW - III		SELISIH
							Rp	%	Rp	%	
UNOR : SEKRETARIAT JENDERAL						**2,089,191,000**	**1,502,253,342**	**71.91%**	**1,511,454,897**	**72.35%**	**0.44%**
PROGRAM : DUKUNGAN MANAJEMEN						**2,089,191,000**	**1,502,253,342**	**71.91%**	**1,511,454,897**	**72.35%**	**0.44%**
SK : Meningkatnya layanan dukungan manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera IV											
IKK : Jumlah Layanan Umum											
1	KRO	7665.EBA	Layanan Dukungan manajemen Internal								
	RO	EBA.962	Layanan Umum	Layanan	3	69,798,000	63,583,920	91.10%	63,974,645	91.66%	0.56%
			Balai P3KP Sumatera IV	Layanan	1	35,994,000	34,839,000	96.79%	34,838,812	96.79%	0.00%
			Satker PKP Prov. Bengkulu	Layanan	1	14,960,000	11,220,000	75.00%	11,562,833	77.29%	2.29%
			Satker PKP Prov. Jambi	Layanan	1	18,844,000	17,524,920	93.00%	17,573,000	93.26%	0.26%
IKK : Jumlah Layanan Perkantoran											
2	KRO	7665.EBA	Layanan Dukungan manajemen Internal								
	RO	EBA.994	Layanan Perkantoran	Layanan	3	1,811,316,000	1,231,505,422	67.99%	1,240,336,802	68.48%	0.49%
			Balai P3KP Sumatera IV	Layanan	1	899,299,000	590,711,000	65.69%	576,038,536	64.05%	-1.63%
			Satker PKP Prov. Bengkulu	Layanan	1	527,808,000	337,269,312	63.90%	357,221,779	67.68%	3.78%
			Satker PKP Prov. Jambi	Layanan	1	384,209,000	303,525,110	79.00%	307,076,487	79.92%	0.92%
IKK : Jumlah Layanan Sarana Internal											
3	KRO	7665.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal								

No		Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator / KRO / RO		SATUAN	TARGET PK	ANGGARAN	TARGET TW III		REALISASI TW - III		SELISIH
							Rp	%	Rp	%	
	RO	01. EBB.951	Layanan Sarana Internal	Unit	42	208,077,000	207,164,000	99.56%	207,143,450	99.55%	-0.01%
			Balai P3KP Sumatera IV	Unit	40	104,039,000	103,126,000	99.12%	103,126,500	99.12%	0.00%
			Satker PKP Prov. Bengkulu	Unit	1	52,019,000	52,019,000	100.00%	52,019,000	100.00%	0.00%
			Satker PKP Prov. Jambi	Unit	1	52,019,000	52,019,000	100.00%	51,997,950	99.96%	-0.04%

Dari 3 IKK pada DIPA Sekretariat Jenderal, terdapat 1 IKK yang telah mencapai output yaitu IKK Layanan Sarana Internal Satker BP3KP Sumatera IV, RO 01.EBB.951 Layanan sarana Internal dengan realisasi akhir sebesar 99,55% atau efisiensi anggaran sebesar Rp 933.550,- dengan output capaian berupa 27 unit Sarana Internal.

Berdasarkan Tabel 2.5 dapat dilihat Target Capaian BP3KP Sumatera IV pada akhir Triwulan III adalah sebesar 71,91% dengan Realisasi Capaian adalah sebesar 72,35% sehingga didapatkan nilai selisih antara Realisasi dengan Target Capaian pada Triwulan III adalah sebesar +0,44%. Hal ini menyimpulkan bahwa Capaian Kinerja pada Triwulan III telah mencapai target.

2.3.2 Capaian Target TW- III DIPA Ditjen Kawasan Permukiman

Tabel 2.3.2. 1 Capaian Kinerja BP3KP Sumatera IV terhadap Target Ditjen. Kawasan Permukiman

No		Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator / KRO / RO		SATUAN	TARGET PK	ANGGARAN	TARGET TW III		REALISASI TW - III		SELISIH
							Rp	%	Rp	%	
UNOR : DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN						**50,444,763,000**	**37,831,819,625**	**75.00%**	**32,301,571,108**	**64.03%**	**-10.96%**
PROGRAM : PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						**50,348,708,000**	**37,794,764,496**	**75.07%**	**32,246,050,083**	**64.05%**	**-11.02%**
SK : Terselenggaranya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam mendukung penyediaan rumah layak huni											
IKK : Jumlah Dokumen Data dan Informasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman											
1	KRO	7659.BMA	Data dan Informasi Publik								
	RO	BMA.001	Data dan Informasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Dokumen	1	15,827,000	15,712,000	99.27%	13,846,180	87.48%	-11.79%
			Balai P3KP Sumatera IV	Dokumen	1	15,827,000	15,712,000	99.27%	13,846,180	87.48%	-11.79%
IKK : Jumlah Laporan Penyusunan Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman											
1	KRO	7659.PBF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana								
	RO	PBF.001	Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Dokumen	1	61,103,000	38,496,000	63.00%	52,813,367	86.43%	23.43%
			Balai P3KP Sumatera IV	Dokumen	1	61,103,000	38,496,000	63.00%	52,813,367	86.43%	23.43%

No		Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator / KRO / RO		SATUAN	TARGET PK	ANGGARAN	TARGET TW III		REALISASI TW - III		SELISIH
							Rp	%	Rp	%	
SK : Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni di kawasan permukiman											
IKK : Jumlah Dokumen Teknis Penyiapan Penanganan Kumuh dan Pengembangan Kawasan Permukiman											
1	KRO	7659.CBR	Dukungan Teknis								
	RO	CBR.002	Dukungan Teknis Penyiapan Penanganan Kumuh dan Pengenbangan Kawasan Permukiman	Dokumen	1	96,406,000	77,811,000	80.71%	70,949,980	73.59%	-7.12%
			Balai P3KP Sumatera IV	Dokumen	1	96,406,000	77,811,000	80.71%	70,949,980	73.59%	-7.12%
IKK : Jumlah Unit Rumah Swadaya melalui Peningkatan Kualitas											
1	KRO	7659.RBB	Prasarana Bidang Perumahan dan Permukiman								
	RO	RBB.008	Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di Kawasan Permukiman	Unit	1,930	41,480,346,000	33,275,211,156	80.22%	32,108,440,556	77.41%	-2.81%
			Satker PKP Prov. Bengkulu	Unit	1,543	33,192,720,000	25,070,461,416	75.53%	23,861,862,406	71.89%	-3.64%
			Satker PKP Prov. Jambi	Unit	387	8,287,626,000	8,204,749,740	99.00%	8,246,578,150	99.50%	0.50%
IKK : Jumlah Unit Rumah yang Memiliki Akses Sanitasi Layak (PK)											
1	KRO	7659.RBB	Prasarana Bidang Perumahan dan Permukiman								
	RO	RBB.007	Rumah Bersanitasi Layak	Unit	200	2,001,067,000	1,040,554,840	52.00%	107,766,175	5.39%	-46.61%
			Satker PKP Prov. Jambi	Unit	200	2,001,067,000	1,040,554,840	52.00%	107,766,175	5.39%	-46.61%
SK : Meningkatnya luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu											
IKK : Luas Permukiman Kumuh yang Ditangani secara Terpadu											
1	KRO	7659.RBB	Prasarana Bidang Perumahan dan Permukiman								
	RO	RBB.006	Penanganan Permukiman Kumuh	Hektar	18.13	6,693,959,000	3,346,979,500	50.00%	1,594,273,300	23.82%	-26.18%
			Satker PKP Prov. Jambi	Hektar	18.13	6,693,959,000	3,346,979,500	50.00%	1,594,273,300	23.82%	-26.18%
PROGRAM : DUKUNGAN MANAJEMEN				**Layan an**	**5**	**96,055,000**	**37,055,129**	**38.58%**	**55,521,025**	**57.80%**	**19.22%**
SK : Meningkatnya layanan dukungan manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman											
IKK : Jumlah Layanan Umum											
1	KRO	7674.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal								
	RO	EBA.962	Layanan Umum	Layan an	3	88,409,000	35,695,129	40.37%	54,161,025	61.26%	20.89%
			Balai P3KP Sumatera IV	Layan an	1	13,357,000	11,992,000	89.78%	11,391,176	85.28%	-4.50%
			Satker PKP Prov. Bengkulu	Layan an	1	45,812,000	23,703,129	51.74%	29,084,649	63.49%	11.75%
			Satker PKP Prov. Jambi	Layan an	1	29,240,000	-	0.00%	13,685,200	46.80%	46.80%
	RO	EBA.963	Jumlah Data dan Informasi	Layan an	1	1,657,000	1,360,000	82.08%	1,360,000	82.08%	0.00%
			Balai P3KP Sumatera IV	Layan an	1	1,657,000	1,360,000	82.08%	1,360,000	82.08%	0.00%

No		Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator / KRO / RO		SATUAN	TARGET PK	ANGGARAN	TARGET TW III		REALISASI TW - III		SELISIH
							Rp	%	Rp	%	
	RO	EBA.956	Jumlah Layanan BMN	Layanan	1	5,989,000	-	0.00%	-	0.00%	0.00%
			Balai P3KP Sumatera IV	Layanan	1	5,989,000	-	0.00%	-	0.00%	0.00%

Berdasarkan Tabel 2.6 dapat dilihat Target Capaian BP3KP Sumatera IV pada akhir Triwulan III adalah sebesar 75,00% dengan Realisasi Capaian adalah sebesar 64,03% sehingga didapatkan nilai selisih antara Realisasi dengan Target Capaian pada Triwulan III adalah sebesar -10,96%. Hal ini menyimpulkan bahwa Capaian Kinerja pada Triwulan III belum mencapai target, sehingga harus dilakukan peningkatan kinerja di triwulan selanjutnya.

2.3.3 Capaian Target TW- II DIPA Ditjen Perumahan Perdesaan

Tabel 2.3.3. 1 Capaian Kinerja BP3KP Sumatera IV terhadap Target Ditjen. Perumahan Perdesaan

No	Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator / KRO / RO		SATUAN	TARGET PK	ANGGARAN	TARGET TW III		REALISASI TW - III		SELISIH
						Rp	%	Rp	%	
UNOR : DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN					**111,335,789,000**	**83,171,402,595**	**74.70%**	**75,937,911,267**	**68.21%**	**-6.50%**
PROGRAM : PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					**111,326,475,000**	**83,164,541,595**	**74.70%**	**75,931,861,267**	**68.21%**	**-6.50%**
SK : Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, dan pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan perumahan perdesaan										
IKK : Jumlah Rekomendasi Kebijakan, Kemitraan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan										
1	KRO	7660.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana							
	RO	ABF.009	Kebijakan, Kemitraan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	Rekomendasi Kebijakan	1	91,778,000	34,622,000	37.72%	34,622,200	37.72%	0.00%
			Balai P3KP Sumatera IV	Rekomendasi Kebijakan	1	91,778,000	34,622,000	37.72%	34,622,200	37.72%	0.00%
IKK : Jumlah Dokumen Data dan Informasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan										
1	KRO	7660.BMA	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana							
	RO	BMA.001	Data dan Informasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	Dokumen	1	30,766,000	21,217,000	68.96%	15,967,732	51.90%	-17.06%
			Balai P3KP Sumatera IV	Dokumen	1	30,766,000	21,217,000	68.96%	15,967,732	51.90%	-17.06%
IKK : Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan										
1	KRO	7660.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan							
	RO	FAE.001	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perdesaan	Laporan	2	90,016,000	62,911,200	69.89%	75,957,500	84.38%	14.49%
			Satker PKP Prov. Bengkulu	Laporan	1	34,381,000	20,628,600	60.00%	34,221,000	99.53%	39.53%
			Satker PKP Prov. Jambi	Laporan	1	55,635,000	42,282,600	76.00%	41,736,500	75.02%	-0.98%
SK : Meningkatnya ketersediaan rumah baru layak huni di perdesaan										
IKK : Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan										
1	KRO	7660.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana							
	RO	ABF.007	Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perdesaan	Rekomendasi Kebijakan	1	8,347,000	3,080,000	36.90%	3,080,000	36.90%	0.00%

No		Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator / KRO / RO		SATUAN	TARGET PK	ANGGARAN	TARGET TW III		REALISASI TW - III		SELISIH
							Rp	%	Rp	%	
			Balai P3KP Sumatera IV	Rekomendasi Kebijakan	1	8,347,000	3,080,000	36.90%	3,080,000	36.90%	0.00%
IKK : Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perdesaan											
1	KRO	7660.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan								
	RO	FAE.004	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perdesaan	Laporan	1	6,508,000	2,040,000	31.35%	2,706,000	41.58%	10.23%
			Balai P3KP Sumatera IV	Laporan	1	6,508,000	2,040,000	31.35%	2,706,000	41.58%	10.23%
IKK : Jumlah Rumah Khusus Perumahan Perdesaan											
1	KRO	7660.RBB	Prasarana Bidang Perumahan dan Permukiman								
	RO	RBB.002	Rumah Khusus Perumahan Perdesaan	Unit	48	15,900,516,000	3,816,123,840	24.00%	3,761,020,550	23.65%	-0.35%
			Satker PKP Prov. Jambi	Unit	48	15,900,516,000	3,816,123,840	24.00%	3,761,020,550	23.65%	-0.35%
SK : Meningkatnya penyediaan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas dan pembangunan perumahan di wilayah perdesaan											
IKK : Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan											
1	KRO	7660.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana								
	RO	ABF.008	Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan	Rekomendasi Kebijakan	1	38,080,000	30,446,000	79.95%	25,606,720	67.24%	-12.71%
			Balai P3KP Sumatera IV	Rekomendasi Kebijakan	1	38,080,000	30,446,000	79.95%	25,606,720	67.24%	-12.71%
IKK : Jumlah Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di Perdesaan											
1	KRO	7660.RBB	Prasarana Bidang Perumahan dan Permukiman								
	RO	RBB.008	Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di Perdesaan	Unit	4393	95,160,464,000	79,194,101,555	83.22%	72,012,900,565	75.68%	-7.55%
			Satker PKP Prov. Bengkulu	Unit	1381	29,832,739,000	15,172,931,055	50.86%	17,912,405,265	60.04%	9.18%
			Satker PKP Prov. Jambi	Unit	3012	65,327,725,000	64,021,170,500	98.00%	54,100,495,300	82.81%	-15.19%
PROGRAM : DUKUNGAN MANAJEMEN				**Layanan**	**4**	**9,314,000**	**6,861,000**	**73.66%**	**6,050,000**		
SK : Meningkatnya layanan dukungan manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan											
IKK : Jumlah Layanan Umum											
1	KRO	7675.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal								
	RO	EBA.962	Layanan Umum	Layanan	3	7,591,000	5,138,000	67.69%	4,940,000	65.08%	-2.61%
			Balai P3KP Sumatera IV	Layanan	1	2,888,000	2,888,000	100.00 %	2,720,000	94.18%	-5.82%
			Satker PKP Prov. Bengkulu	Layanan	1	2,250,000	2,250,000	100.00 %	2,220,000	98.67%	-1.33%

No		Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator / KRO / RO		SATUAN	TARGET PK	ANGGARAN	TARGET TW III		REALISASI TW - III		SELISIH
							Rp	%	Rp	%	
			Satker PKP Prov. Jambi	Layanan	1	2,453,000	-	0.00%	-	0.00%	0.00%
SK : Meningkatnya layanan dukungan manajemen Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan											
IKK : Jumlah Layanan Data dan Informasi											
1	KRO	7675.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal								
	RO	EBA.963	Layanan Data dan Informasi	Layanan	1	1,723,000	1,723,000	100.00 %	1,110,000	64.42%	-35.58%
			Balai P3KP Sumatera IV	Layanan	1	1,723,000	1,723,000	100.00 %	1,110,000	64.42%	-35.58%

Dari 10 IKK yang terdapat pada DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan, terdapat 1 IKK yang telah mencapai output yaitu IKK Jumlah Layanan Umum, RO EBA.962 Layanan Umum Satker BP3KP Sumatera IV dengan realisasi akhir sebesar 94,18% atau efisiensi anggaran sebesar Rp 168.000,- dengan output capaian berupa 1 Layanan.

Berdasarkan Tabel 2.7 dapat dilihat Target Capaian BP3KP Sumatera IV pada akhir Triwulan III adalah sebesar 74,70% dengan Realisasi Capaian adalah sebesar 68,21% sehingga didapatkan nilai selisih antara Realisasi dengan Target Capaian pada Triwulan III adalah sebesar -6,50%. Hal ini menyimpulkan bahwa Capaian Kinerja pada Triwulan III belum mencapai target, sehingga harus dilakukan peningkatan kinerja di triwulan selanjutnya.

2.3.4 Capaian Target TW- III DIPA Ditjen Perumahan Perkotaan

Tabel 2.3.4. 1 Capaian Kinerja BP3KP Sumatera IV terhadap Target Ditjen. Perumahan Perkotaan

No		Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator / KRO / RO		SATUAN	TARGET PK	ANGGARAN	TARGET TW III		REALISASI TW - III		SELISIH
							Rp	%	Rp	%	
UNOR : DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN						**64,492,497,000**	**18,802,210,626**	**29.15%**	**17,296,533,581**	**26.82%**	**-2.33%**
PROGRAM : PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						**64,437,373,000**	**18,756,063,826**	**29.11%**	**17,247,394,578**	**26.77%**	**-2.34%**
SK : Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan perumahan perkotaan											
IKK : Jumlah Rekomendasi Kebijakan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan											
1	KRO	7661.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana								
	RO	ABF.001	Kebijakan, Kemitraan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	1	65,034,000	30,692,000	47.19%	43,856,632	67.44%	20.24%
			Balai P3KP Sumatera IV	Rekomendasi Kebijakan	1	65,034,000	30,692,000	47.19%	43,856,632	67.44%	20.24%

No		Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator / KRO / RO	SATUAN	TARGET PK	ANGGARAN	TARGET TW III		REALISASI TW - III		SELISIH
						Rp	%	Rp	%	
IKK : Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan										
1	KRO	7661.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan							
	RO	FAE.001	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	Laporan	3	51,221,000	29,973,600	58.52%	26,242,184	51.23%	-7.28%
			Balai P3KP Sumatera IV	Laporan	1	24,913,000	23,570,000	94.61%	6,406,684	25.72%	-68.89%
			Satker PKP Prov. Bengkulu	Laporan	1	6,288,000	4,401,600	70.00%	6,288,000	100.00 %	30.00%
			Satker PKP Prov. Jambi	Laporan	1	20,020,000	2,002,000	10.00%	13,547,500	67.67%	57.67%
SK : Meningkatnya Akses Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perkotaan										
IKK : Jumlah Kebijakan Penyelenggaraan Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perkotaan										
1	KRO	7661.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana							
	RO	ABF.002	Kebijakan Penyelenggaraan Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	1	17,049,000	14,052,000	82.42%	11,052,000	64.82%	-17.60%
			Balai P3KP Sumatera IV	Rekomendasi Kebijakan	1	17,049,000	14,052,000	82.42%	11,052,000	64.82%	-17.60%
SK : Meningkatnya Akses Rumah Tangga yang Terfasilitasi Pembiayaan Perumahan di Wilayah Perkotaan										
IKK : Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan Perkotaan										
1	KRO	7661.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana							
	RO	ABF.003	Kebijakan Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan Perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	1	11,965,000	10,204,000	85.28%	7,204,000	60.21%	-25.07%
			Balai P3KP Sumatera IV	Rekomendasi Kebijakan	1	11,965,000	10,204,000	85.28%	7,204,000	60.21%	-25.07%
SK : Meningkatnya Ketersediaan Rumah Baru Layak Huni di Perkotaan										
IKK : Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perkotaan										
1	KRO	7661.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana							
	RO	ABF.004	Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	1	7,755,000	150,000	1.93%	150,000	1.93%	0.00%
			Balai P3KP Sumatera IV	Rekomendasi Kebijakan	1	7,755,000	150,000	1.93%	150,000	1.93%	0.00%
IKK : Jumlah Unit Rumah Susun ASN/TNI/POLRI Perumahan Perkotaan										
1	KRO	7661.RBB	Prasarana Bidang Perumahan dan Permukiman							

No		Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator / KRO / RO		SATUAN	TARGET PK	ANGGARAN	TARGET TW III		REALISASI TW - III		SELISIH
							Rp	%	Rp	%	
	RO	RBB.003	Rumah Susun Hunian ASN/TNI/POLRI Perumahan Perkotaan	Unit	12	7,924,502,000	7,924,502,000	100.00%	5,766,983,927	72.77%	-27.23%
			Satker PKP Prov. Jambi	Unit	12	7,924,502,000	7,924,502,000	100.00%	5,766,983,927	72.77%	-27.23%
SK : Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni melalui Peningkatan Kualitas Pembangunan Perumahan di Wilayah Perkotaan											
IKK : Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan											
1	KRO	7661.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana								
	RO	ABF.005	Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	1	89,045,000	80,463,000	90.36%	58,567,700	65.77%	-24.59%
			Balai P3KP Sumatera IV	Rekomendasi Kebijakan	1	89,045,000	80,463,000	90.36%	58,567,700	65.77%	-24.59%
IKK : Jumlah Unit Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di Perkotaan											
1	KRO	7661.RBB	Prasarana Bidang Perumahan dan Permukiman								
	RO	RBB.008	Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di Perkotaan	Unit	1675	56,270,802,000	10,666,027,226	18.95%	11,333,338,135	20.14%	1.19%
			Satker PKP Prov. Bengkulu	Unit	1075	21,882,074,000	5,507,718,026	25.17%	6,271,652,435	28.66%	3.49%
			Satker PKP Prov. Jambi	Unit	600	34,388,728,000	5,158,309,200	15.00%	5,061,685,700	14.72%	-0.28%
PROGRAM : DUKUNGAN MANAJEMEN				**Layanan**	**5**	**55,124,000**	**46,146,800**	**83.71%**	**49,139,003**	**89.14%**	**5.43%**
SK : Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan											
IKK : Jumlah Layanan Umum											
1	KRO	7676.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal								
	RO	EBA.962	Layanan Umum	Layanan	3	29,038,000	20,060,800	69.08%	25,222,026	86.86%	17.77%
			Balai P3KP Sumatera IV	Layanan	1	13,994,000	5,212,000	37.24%	10,405,726	74.36%	37.11%
			Satker PKP Prov. Bengkulu	Layanan	1	11,140,000	11,140,000	100.00%	11,140,000	100.00 %	0.00%
			Satker PKP Prov. Jambi	Layanan	1	3,904,000	3,708,800	95.00%	3,676,300	94.17%	-0.83%
IKK : Jumlah Layanan Data dan Informasi											
1	KRO	7676.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal								
	RO	EBA.963	Layanan Data dan Informasi	Layanan	1	13,339,000	13,339,000	100.00%	13,336,380	99.98%	-0.02%
			Balai P3KP Sumatera IV	Layanan	1	13,339,000	13,339,000	100.00%	13,336,380	99.98%	-0.02%
IKK : Jumlah Layanan BMN											
1	KRO	7676.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal								
	RO	EBA.Z06	Layanan BMN	Layanan	1	12,747,000	12,747,000	100.00%	10,580,597	83.00%	-17.00%
			Balai P3KP Sumatera IV	Layanan	1	12,747,000	12,747,000	100.00%	10,580,597	83.00%	-17.00%

Dari 11 IKK yang terdapat pada DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan, terdapat 1 IKK yang telah mencapai output yaitu IKK Jumlah Layanan Data dan Informasi, RO EBA.963 Layanan Data dan Informasi Satker BP3KP Sumatera IV dengan realisasi akhir sebesar 99,98% atau efisiensi anggaran sebesar Rp 2.620,- dengan output capaian berupa 1 Layanan.

Berdasarkan Tabel 2.8 dapat dilihat Target Capaian BP3KP Sumatera IV pada akhir Triwulan III adalah sebesar 29,15% dengan Realisasi Capaian adalah sebesar 26,82% sehingga didapatkan nilai selisih antara Realisasi dengan Target Capaian pada Triwulan III adalah sebesar -2,33%. Hal ini menyimpulkan bahwa Capaian Kinerja pada Triwulan III belum mencapai target, sehingga harus dilakukan peningkatan kinerja di triwulan selanjutnya.

2.3.5 Capaian Target TW- III DIPA Ditjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko

Tabel 2.3.5. 1 Capaian Kinerja BP3KP Sumatera IV terhadap Target Ditjen TKPR

No	Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator / KRO / RO		SATUAN	TARGET PK	ANGGARAN	TARGET TW III		REALISASI TW - III		SELISIH
						Rp	%	Rp	%	
UNOR : DIREKTORAT JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO					**79,894,000**	**62,104,000**	**77.73%**	**58,660,766**	**73.42%**	**-4.31%**
PROGRAM : PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					**79,894,000**	**62,104,000**	**77.73%**	**58,660,766**	**73.42%**	**-4.31%**
SK : Meningkatnya dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel										
IKK : Jumlah Rekomendasi Kebijakan Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas										
1	KRO	7662.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana							
	RO	ABF.004	Kebijakan Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas	Rekomendasi Kebijakan	1	15,339,000	14,546,000	94.83%	14,266,000	93.00%	-1.83%
			Balai P3KP Sumatera IV	Rekomendasi Kebijakan	1	15,339,000	14,546,000	94.83%	14,266,000	93.00%	-1.83%
SK : Meningkatnya dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman										
IKK : Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi										
1	KRO	7662.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana							
	RO	ABF.005	Kebijakan Manajemen Risiko dan Pencegarah Korupsi	Rekomendasi Kebijakan	1	52,601,000	37,850,000	71.96%	34,438,000	65.47%	-6.49%
			Balai P3KP Sumatera IV	Rekomendasi Kebijakan	1	52,601,000	37,850,000	71.96%	34,438,000	65.47%	-6.49%
SK : Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko perumahan dan kawasan permukiman										
IKK : Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko										
1	KRO	7662.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan							
	RO	FAE.001	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Tata Kelola dan	Laporan	1	11,954,000	9,708,000	81.21%	9,956,766	83.29%	2.08%

No		Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator / KRO / RO		SATUAN	TARGET PK	ANGGARAN	TARGET TW III		REALISASI TW - III		SELISIH
							Rp	%	Rp	%	
			Pengendalian Risiko								
			Balai P3KP Sumatera IV	Laporan	1	11,954,000	9,708,000	81.21%	9,956,766	83.29%	2.08%

Berdasarkan Tabel 2.9 dapat dilihat Target Capaian BP3KP Sumatera IV pada akhir Triwulan III adalah sebesar 77,73% dengan Realisasi Capaian adalah sebesar 73,42% sehingga didapatkan nilai selisih antara Realisasi dengan Target Capaian pada Triwulan III adalah sebesar -4,31%. Hal ini menyimpulkan bahwa Capaian Kinerja pada Triwulan III belum mencapai target, sehingga harus dilakukan peningkatan kinerja di triwulan selanjutnya.

2.4 Permasalahan / Faktor Keberhasilan

Permasalahan yang dihadapi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera IV pada Triwulan III dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.4. 1 Permasalahan BP3KP Sumatera IV pada Triwulan III

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	PERMASALAHAN
UNOR : SEKRETARIAT JENDERAL			
1	Meningkatnya layanan dukungan manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera IV	Jumlah Layanan Umum	**BALAI:** - TIDAK ADA **BENGKULU:** -TIDAK ADA **JAMBI :** -TIDAK ADA
		Jumlah Layanan Perkantoran	**BALAI:** - TIDAK ADA **BENGKULU:** -TIDAK ADA **JAMBI :** -TIDAK ADA
		Jumlah Layanan Sarana Internal	**BALAI:** - TIDAK ADA **BENGKULU:** -TIDAK ADA **JAMBI :** -TIDAK ADA
UNOR : DITJEN. KAWASAN PERMUKIMAN			
1	Terselenggaranya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam mendukung penyediaan rumah layak huni	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	**BALAI:** TIDAK ADA
		Jumlah Laporan Penyusunan Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman	**BALAI:** TIDAK ADA

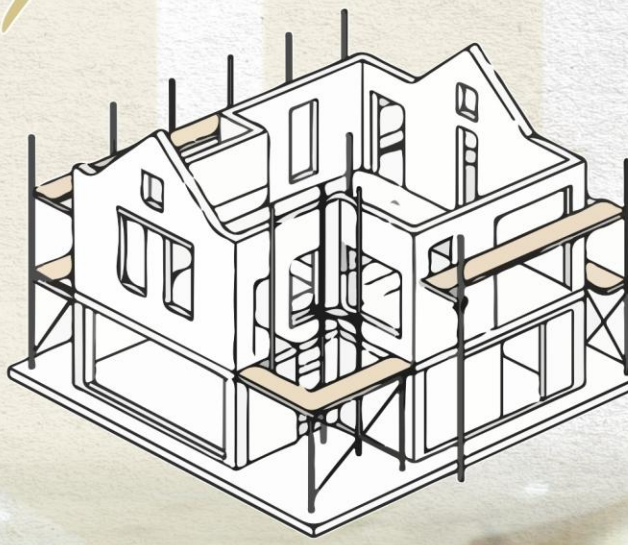
NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	PERMASALAHAN
2	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni di kawasan permukiman	Jumlah Dokumen Teknis Penyiapan Penanganan Kumuh dan Pengembangan Kawasan Permukiman	**BALAI:** TIDAK ADA
		Jumlah Unit Rumah Swadaya melalui Peningkatan Kualitas	**BENGKULU:** - Data intsruksi verifikasi yang diterima Satuan Kerja melebihi alokasi unit yang terdapat pada DIPA yang mengakibatkan banyak data CPB yang tidak dapat ditetapkan sebagai penerima bantuan (SK PPK), sehingga terjadi gejolak pada Pemerintah Daerah. - Keterlambatan penginputan data administrasi pada GO PKP oleh Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM). - Terdapat 4 (empat) penerima bantuan Bedah Rumah yang mengundurkan diri setelah terbitnya SK PPK dikarenakan penerima bantuan tersebut sudahmembangun rumah lebih awal. **JAMBI :** - Data CPB dari Instruksi Verifikasi banyak yang tidak direkomendasikan, berdasarkan total data per 26 September 2026, dari 4.424 Unit yang di verifikasi, 2.874 unit direkomendasikan, dan 1.550 tidak direkomendasikan
3	Meningkatnya layanan dukungan manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman	Jumlah Layanan Umum	**BALAI: -** TIDAK ADA **BENGKULU: -**TIDAK ADA **JAMBI : -**TIDAK ADA
		Jumlah Data dan Informasi	**BALAI:** - TIDAK ADA
		Jumlah Layanan BMN	**BALAI**: - TIDAK ADA
UNOR : DITJEN. PERUMAHAN PERDESAAN			
1	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, dan pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan perumahan perdesaan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan, Kemitraan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	**BALAI:** -TIDAK ADA
		Jumlah Dokumen Data dan Informasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	**BALAI:** -TIDAK ADA
		Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	**BENGKULU:** - TIDAK ADA **JAMBI :** -TIDAK ADA
2	Meningkatnya ketersediaan rumah baru layak huni di perdesaan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan	**BALAI:** -TIDAK ADA

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	PERMASALAHAN
		Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perdesaan	**BALAI:** -TIDAK ADA
		Jumlah Rumah Khusus Perumahan Perdesaan	**JAMBI:** - Land clearing pembangunan area rumah khusus yang terhambat karna alat yang tidak memadai
3	Meningkatnya penyediaan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas dan pembangunan perumahan di wilayah perdesaan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan	**BALAI:** - personil yg ditugaskan sedang ada penugasan lain, padatnya jadwal kegiatan tim kasi 2
		Jumlah Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di Perdesaan	**BENGKULU:** - Data intsruksi verifikasi yang diterima Satuan Kerja melebihi alokasi unit yang terdapat pada DIPA yang mengakibatkan banyak data CPB yang tidak dapat ditetapkan sebagai penerima bantuan (SK PPK), sehingga terjadi gejolak pada Pemerintah Daerah. - Keterlambatan penginputan data administrasi pada GO PKP oleh Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM). **JAMBI :** - data CPB dari Instruksi Verifikasi banyak yang tidak direkomendasikan, berdasarkan total data per 26 September 2026, dari 4.424 Unit yang di verifikasi, 2.874 unit direkomendasikan, dan 1.550 tidak direkomendasikan
4	Meningkatnya layanan dukungan manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan	Jumlah Layanan Umum	**BALAI: -** TIDAK ADA **BENGKULU: -**TIDAK ADA **JAMBI : -**TIDAK ADA
5	Meningkatnya layanan dukungan manajemen Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	Jumlah Layanan Data dan Informasi	**BALAI:** - TIDAK ADA
UNOR : DITJEN. PERUMAHAN PERKOTAAN			
1	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan perumahan perkotaan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	**BALAI:** -TIDAK ADA
		Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	**BALAI:** - TIDAK ADA **BENGKULU:** - TIDAK ADA **JAMBI : -** TIDAK ADA

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	PERMASALAHAN
2	Meningkatnya Akses Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perkotaan	Jumlah Kebijakan Penyelenggaraan Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perkotaan	**BALAI:** - padatnya tugas dari personil kasi 2 sehingga terjadi reschedule jadwal pelaksanaan kegiatan di prov. jambi
3	Meningkatnya Akses Rumah Tangga yang Terfasilitasi Pembiayaan Perumahan di Wilayah Perkotaan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan Perkotaan	**BALAI:** - padatnya tugas dari personil kasi 2 sehingga terjadi reschedule jadwal pelaksanaan kegiatan di prov. jambi
4	Meningkatnya Ketersediaan Rumah Baru Layak Huni di Perkotaan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perkotaan	**BALAI:** -TIDAK ADA
		Jumlah Unit Rumah Susun ASN/TNI/POLRI Perumahan Perkotaan	**JAMBI:** -• Kekurangan Tenaga Kerja (Man Power), dikarenakan keterlambatan proses pelaksanaan fisik dari periode sebelumnya. Maka proses percepatan terkendala kekurangan tenaga kerja (khususnya saat masuk ke pekerjaan Arsitektur serta Mekanikal, Elektrikal, dan Plumbing/MEP) • Faktor Cuaca (Hujan) Curah hujan menyebabkan potensi idle time (waktu tunggu/jeda pengerjaan) serta adanya ancaman air hujan yang masuk ke area lubang vertikal atau dak yang dapat merusak/menggenangi area kerja dan instalasi di lantai bawahnya. • Tertib Administrasi, Beberapa kelengkapan dokumen teknis, administrasi, dan pencatatan pekerjaan di lapangan masih belum lengkap atau terlambat diselesaikan. • Kepatuhan K3 dan Handling Material, Diperlukan sinkronisasi antara alat, bahan, dan tenaga kerja secara presisi agar tidak membuang waktu (handling time tinggi) di proyek, serta masih perlunya pengawasan ketat terhadap kedisiplinan pekerja dalam memakai Alat Pelindung Diri (APD).
5	Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni melalui Peningkatan Kualitas	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan	**BALAI:** - sudah dilaksanakan, menunggu proses di keuangan

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	PERMASALAHAN
	Pembangunan Perumahan di Wilayah Perkotaan	Jumlah Unit Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di Perkotaan	**BENGKULU:** - Data intsruksi verifikasi yang diterima Satuan Kerja melebihi alokasi unit yang terdapat pada DIPA yang mengakibatkan banyak data CPB yang tidak dapat ditetapkan sebagai penerima bantuan (SK PPK), sehingga terjadi gejolak pada Pemerintah Daerah. - Data intsruksi verifikasi yang diterima Satuan Kerja kurang dari alokasi unit yang terdapat pada DIPA Perkotaan yang mengakibatkan pengalihan pekerjaan fisik ke direktorat teknis lain. **JAMBI :** - data CPB dari Instruksi Verifikasi banyak yang tidak direkomendasikan, berdasarkan total data per 6 September 2026, dari 4.424 Unit yang di verifikasi, 2.874 unit direkomendasikan, dan 1.550 tidak direkomendasikan
6	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan	Jumlah Layanan Umum	**BALAI:** TIDAK ADA **BENGKULU: -** TIDAK ADA **JAMBI : -**TIDAK ADA
		Jumlah Layanan Data dan Informasi	**BALAI:** -TIDAK ADA
		Jumlah Layanan BMN	**BALAI:** -TIDAK ADA
UNOR : DITJEN. TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO			
1	Meningkatnya dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas	**BALAI:** -TIDAK ADA
2	Meningkatnya dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi	**BALAI:** - menunggu kebijakan dari pusat terkait kegiatan SMAP
3	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko perumahan dan kawasan permukiman	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	BALAI: - TIDAK ADA

BAB III
Penutup





BAB III
PENUTUP

3.1 RENCANA TINDAK LANJUT

Pelaksanaan penyerapan anggaran di lingkungan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera IV pada Triwulan III terdapat permasalahan. Adapun rencana tindak lanjut dari permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1. 1 Rencana Tindak Lanjut BP3KP Sumatera IV pada Triwulan III

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	UNKER	TRIWULAN SEBELUMNYA (TW - II)			TRIWULAN SAAT INI (TW - III)	
				PERMASALAHAN	RENCANA TINDAK LANJUT	BUKTI TINDAK LANJUT (FOTO / LINK NOTULEN)	PERMASALAHAN	RENCANA TINDAK LANJUT TW-III
UNOR : SEKRETARIAT JENDERAL								
1	Meningkatnya layanan dukungan manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera IV	Jumlah Layanan Umum	BALAI BKL JBI	**BALAI: -** TIDAK ADA **BENGKULU: -**TIDAK ADA **JAMBI : -**TIDAK ADA	**BALAI: -** TIDAK ADA **BENGKULU: -**TIDAK ADA **JAMBI : -**TIDAK ADA		**BALAI: -** TIDAK ADA **BENGKULU: -**TIDAK ADA **JAMBI : -**TIDAK ADA	**BALAI: -** TIDAK ADA **BENGKULU: -**TIDAK ADA **JAMBI : -**TIDAK ADA
		Jumlah Layanan Perkantoran	BALAI BKL JBI	**BALAI: -** Keterlambatan proses SPJ pada bulan Juni dikarenakan pergantian PPK Balai **BENGKULU**: -TIDAK ADA **JAMBI** : -TIDAK ADA	**BALAI: -** akan segera dilaksanakan di Bulan Juli **BENGKULU: -** TIDAK ADA **JAMBI :** -TIDAK ADA		**BALAI: -** TIDAK ADA **BENGKULU: -**TIDAK ADA **JAMBI : -**TIDAK ADA	**BALAI: -** TIDAK ADA **BENGKULU: -**TIDAK ADA **JAMBI : -**TIDAK ADA
		Jumlah Layanan Sarana Internal	BALAI BKL JBI	**BALAI: -** keterlambatan proses akibat pergantian PPK Balai **BENGKULU: -** TIDAK ADA **JAMBI** : -TIDAK ADA	**BALAI: -** akan segera dilaksanakan di Bulan Juli **BENGKULU: -** TIDAK ADA **JAMBI** : -TIDAK ADA		**BALAI: -** TIDAK ADA **BENGKULU: -**TIDAK ADA **JAMBI : -**TIDAK ADA	**BALAI: -** TIDAK ADA **BENGKULU: -** TIDAK ADA **JAMBI :** -TIDAK ADA
UNOR : DITJEN. KAWASAN PERMUKIMAN								

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	UNKER	TRIWULAN SEBELUMNYA (TW - II)			TRIWULAN SAAT INI (TW - III)	
				PERMASALAHAN	RENCANA TINDAK LANJUT	BUKTI TINDAK LANJUT (FOTO / LINK NOTULEN)	PERMASALAHAN	RENCANA TINDAK LANJUT TW-III
1	Terselenggaranya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam mendukung penyediaan rumah layak huni	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	BALAI	**BALAI:** - menunggu pelaksanaan kegiatan kumuh dan sanitasi di kab. tanjung jabung timur	**BALAI:** - menunggu pelaksanaan kegiatan fisik		**BALAI:** TIDAK ADA	**BALAI:** TIDAK ADA
		Jumlah Laporan Penyusunan Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman	BALAI	**BALAI:** TIDAK ADA	**BALAI:** TIDAK ADA		**BALAI:** TIDAK ADA	**BALAI:** - TIDAK ADA
2	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni di kawasan permukiman	Jumlah Dokumen Teknis Penyiapan Penanganan Kumuh dan Pengembangan Kawasan Permukiman	BALAI	**BALAI:** TIDAK ADA	**BALAI:** TIDAK ADA		**BALAI:** TIDAK ADA	**BALAI:** - TIDAK ADA
		Jumlah Unit Rumah Swadaya melalui Peningkatan Kualitas	BKL JBI	**BENGKULU:** - Rendahnya persentase kelolosan hasil verifikasi Calon Penerima Bantuan BSPS - Terdapat Desa Pagar di Kabupaten Seluma mundur dari kegiatan BSPS karena terjadi indikasi keberpihakan pada saat Pemilihan Toko Terbuka (PTT). - Terjadinya pemalsuan data dan informasi tempat tinggal oleh Calon Penerima Bantuan di	**BENGKULU:** - Melaksanakan koordinasi dan sosialisasi kepada instansi pengusul BSPS. - Dilakukan pengusulan pergantian desa penerima BSPS. - Dilakukan koordinasi antara tim Satker PKP Provinsi Bengkulu, perangkat desa dan calon penerima bantuan terkait penyelesaian masalah tersebut. **JAMBI :** Percepatan penyelesaian inputing data verifikasi CPB, dengan: • Input/upload data CPB kedalam Applikasi GOPKP	**BENGKULU:** - Mengadakan sosialisasi pembaruan juknis yang tertuang dalam Permen PKP Nomor 6 Tahun 2026 tentang Bedah Rumah bersama instansi pengusul (Kementerian Kebudayaan, Kementerian Sosial, DPD RI, DPR RI dan Pemda) pada tanggal 19 Agustus 2026. - Telah dilakukan rapat pembahasan bersama Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Seluma dengan hasil Berita Acara Pembahasan Pengusulan Desa Pengganti dan melakukan pergantian ke Desa Bukit Peninjauan II (12 unit) dan Desa Riak Siabun (7 unit). Berita acara rapat Pengusulan Desa Pengganti	**BENGKULU:** - Data intsruksi verifikasi yang diterima Satuan Kerja melebihi alokasi unit yang terdapat pada DIPA yang mengakibatkan banyak data CPB yang tidak dapat ditetapkan sebagai penerima bantuan (SK PPK), sehingga terjadi gejolak pada Pemerintah Daerah. - Keterlambatan penginputan data administrasi pada GO PKP oleh Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM). - Terdapat 4 (empat) penerima bantuan Bedah Rumah yang mengundurkan diri setelah terbitnya SK PPK dikarenakan penerima bantuan tersebut sudahmembangun rumah lebih awal. **JAMBI :** • Kekurangan tukang, sehingga progres pekerjaan fisik terlambat	**BENGKULU:** - Melakukan komunikasi melalui surat tertulis dan secara lisan kepada Pemerintah Daerah mengenai kondisi ketersediaan anggaranyang ada pada Satuan Kerja. - Melakukan pendampingan dan pengawasan secara intensif dan berkala kepada setiap TPM melalui monitoring progres penginputan data pada GO PKP dan menghubungi langsung masing-masing TPM agar segera menginput hasil pelaksanaan kegiatan Bedah Rumah. - Melakukan pengembalian dana kembali ke uang kas negara sesuai dengan ketentuan yang ada. **JAMBI :** Mendatangkan tukang dari desa

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	UNKER	TRIWULAN SEBELUMNYA (TW - II)			TRIWULAN SAAT INI (TW - III)	
				PERMASALAHAN	RENCANA TINDAK LANJUT	BUKTI TINDAK LANJUT (FOTO / LINK NOTULEN)	PERMASALAHAN	RENCANA TINDAK LANJUT TW-III
				Desa Layang Lekat dan Desa Arga Indah I Kecamatan Pagar Jati Kabupaten Bengkulu Tengah **JAMBI :** - Data CPB dari Instruksi Verifikasi banyak yang tidak direkomendasikan, berdasarkan total data per 26 September 2026, dari 4.424 Unit yang di verifikasi, 2.874 unit direkomendasikan, dan 1.550 tidak direkomendasikan	hingga lengkap sesuai persyaratan yang diminta dan segera kirim (submit) agar menambah progres. • Sehubungan dengan hasil verifikasi CPB eBSPS pertanggal 26/06/2026 yang direkomendasi baru mencapai 2.874 unit sedangkan yang tidak direkomendasi 1.550 unit, selesai 4.424 unit (86,0%) dari quota tahap II, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, maka dihimbau khususnya kepada Korkab dan TFL pada masing-masing Kabupaten/Kota untuk segera melengkapi kekurangan data yang diminta agar bisa segera dikirim (submit). • Koordinasi dengan pihak terkait terkait pemutakhiran data.	Desa Pagar Seluma.pdf - Melakukan musyawarah bersama perangkat desa, tokoh masyarakat dan calon penerima bantuan, hasil kesepakatan data yang tidak sesuai dengan ketentuan dinyatakan batal dan langsung menyampaikan data pengganti. 07072026_Nota Dinas Penyelesaian CPB Tidak Memenuhi Syarat.pdf	• Beberapa lokasi penerima bantuan yang tidak bisa diakses dengan jalur darat	sebelah dan tukang membagi waktu pengerjaan rumah pb • Naik kapal Pompong saat mengantar anakanak pergi / pualang sekolah
		Jumlah Rumah Bersanitasi Layak	JBI	**JAMBI**: - TIDAK ADA	**JAMBI**: - TIDAK ADA		**JAMBI**: • Air Pasang Surut • Galian lobang Tapak berair	**JAMBI**:
3	Meningkatnya luasan Permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu	Luas Penanganan Permukiman Kumuh	JBI	**JAMBI**: - TIDAK ADA	**JAMBI**: - TIDAK ADA		**JAMBI**: - TIDAK ADA	**JAMBI**: - TIDAK ADA
4	Meningkatnya layanan dukungan manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman	Jumlah Layanan Umum	BALAI BKL JBI	**BALAI: -** TIDAK ADA **BENGKULU: -**TIDAK ADA **JAMBI : -**TIDAK ADA	**BALAI: -** TIDAK ADA **BENGKULU: -**TIDAK ADA **JAMBI : -**TIDAK ADA		**BALAI: -** TIDAK ADA **BENGKULU: -**TIDAK ADA **JAMBI : -**TIDAK ADA	**BALAI: -** TIDAK ADA **BENGKULU: -**TIDAK ADA **JAMBI : -**TIDAK ADA
		Jumlah Data dan Informasi	BALAI	**BALAI:** TIDAK ADA	**BALAI:** TIDAK ADA		**BALAI**: - TIDAK ADA	**BALAI:** - TIDAK ADA

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	UNKER	TRIWULAN SEBELUMNYA (TW - II)			TRIWULAN SAAT INI (TW - III)	
				PERMASALAHAN	RENCANA TINDAK LANJUT	BUKTI TINDAK LANJUT (FOTO / LINK NOTULEN)	PERMASALAHAN	RENCANA TINDAK LANJUT TW-III
		Jumlah Layanan BMN	BALAI	**JAMBI**: - TIDAK ADA	**JAMBI**: - TIDAK ADA		**BALAI:** - TIDAK ADA	**BALAI:** - TIDAK ADA
UNOR : DITJEN. PERUMAHAN PERDESAAN								
1	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, dan pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan perumahan perdesaan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan, Kemitraan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	BALAI	**JAMBI**: - TIDAK ADA	**BALAI:** -TIDAK ADA		**BALAI:** - TIDAK ADA	**BALAI:** - TIDAK ADA
		Jumlah Dokumen Data dan Informasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	BALAI	**JAMBI**: - TIDAK ADA	**BALAI:** -TIDAK ADA		**BALAI:** - TIDAK ADA	**BALAI:** - TIDAK ADA
		Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	BKL JBI	**BENGKULU:** - TIDAK ADA **JAMBI :** -TIDAK ADA	**BENGKULU:** - TIDAK ADA **JAMBI :** -TIDAK ADA		**BENGKULU:** - TIDAK ADA **JAMBI :** -TIDAK ADA	**BENGKULU:** - TIDAK ADA **JAMBI :** -TIDAK ADA
2	Meningkatnya ketersediaan rumah baru layak huni di perdesaan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan	BALAI	**BALAI:** - TIDAK ADA	**BALAI:** - TIDAK ADA		**BALAI:** - TIDAK ADA	**BALAI:** - TIDAK ADA
		Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perdesaan	BALAI	**BALAI:** - TIDAK ADA	**BALAI:** - TIDAK ADA		**BALAI:** - TIDAK ADA	**BALAI:** - TIDAK ADA

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	UNKER	TRIWULAN SEBELUMNYA (TW - II)			TRIWULAN SAAT INI (TW - III)	
				PERMASALAHAN	RENCANA TINDAK LANJUT	BUKTI TINDAK LANJUT (FOTO / LINK NOTULEN)	PERMASALAHAN	RENCANA TINDAK LANJUT TW-III
		Jumlah Rumah Khusus Perumahan Perdesaan	JBI	**JAMBI:** - Land clearing pembangunan area rumah khusus yang terhambat karna alat yang tidak memadai	**JAMBI:** - Koordinasi dengan pihak terkait untuk penyelesaian land clearing pembangunan area rumah khusus		**JAMBI:** - Site Plan Rencana Tidak dapat direalisasikan sesuai desain perencana - Pengendalian mutu dan ketepatan dimensi/elevasi galian, urugan pasir, batu kosong dan pondasi menerus perlu dilakukan sebelum masuk ke tahapan berikutnya - Pekerjaan bekisting, pembesian dan beton sloof perlu dipersiapkan pada unit yang pondasinya telah selesai agar pekerjaan dapat berjalan paralel	**JAMBI:** -Lakukan Pengukuran ulang untuk site plan yang tidak bisa di kerjalan/dibangun. Diambil datapengukuran Cross Section sesuai dengan existing lapangan - Melakukan pemeriksaan dimensi, elevasi, volume dan hasil pekerjaan; memastikan pekerjaan yang telah diperiksa dapat dilanjutkan ke tahapan berikutnya - Menyiapkan bekisting dan pembesian secara bertahap; melakukan pemeriksaan sebelum pengecoran; memastikan dimensi, tulangan dan kesiapan pekerjaan sesuai dokumen teknis
3	Meningkatnya penyediaan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas dan pembangunan perumahan di wilayah perdesaan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan	BALAI	**BALAI:** - personil yg ditugaskan sedang ada penugasan lain, padatnya jadwal kegiatan tim kasi 2	**BALAI:** - personil yg ditugaskan sedang ada penugasan lain, padatnya jadwal kegiatan tim kasi 2		**BALAI:** - TIDAK ADA	**BALAI:** - TIDAK ADA
		Jumlah Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di Perdesaan	BKL JBI	**BENGKULU:** -Rendahnya persentase kelolosan hasil verifikasi Calon Penerima Bantuan BSPS **JAMBI :** - Data CPB dari Instruksi Verifikasi banyak yang tidak direkomendasikan, berdasarkan total data per 26 September 2026, dari 4.424 Unit yang	**BENGKULU:** - Data intsruksi verifikasi yang diterima Satuan Kerja melebihi alokasi unit yang terdapat pada DIPA yang mengakibatkan banyak data CPB yang tidak dapat ditetapkan sebagai penerima bantuan (SK PPK), sehingga terjadi gejolak pada Pemerintah Daerah. - Keterlambatan penginputan data administrasi pada GO PKP oleh Tenaga Pendamping	**BENGKULU:** -Mengadakan sosialisasi pembaruan juknis yang tertuang dalam Permen PKP Nomor 6 Tahun 2026 tentang Bedah Rumah bersama instansi pengusul (Kementerian Kebudayaan, Kementerian Sosial, DPD RI, DPR RI dan Pemda) pada tanggal 19 Agustus 2026.	**BENGKULU:** - Data intsruksi verifikasi yang diterima Satuan Kerja melebihi alokasi unit yangterdapat pada DIPA yang mengakibatkan banyak data CPB yang tidak dapat ditetapkan sebagai penerima bantuan (SK PPK), sehingga terjadi gejolak pada Pemerintah Daerah. - Keterlambatan penginputan data administrasi pada GO PKP oleh Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM). **JAMBI :** - Keterlambatan pengiriman material seperti papan dan kayu yang langka, serta batu bata yang tinggi permintaan - Kekurangan tukang, sehingga progres	**BENGKULU:** - Melakukan komunikasi melalui surat tertulis dan secara lisan kepada Pemerintah Daerah mengenai kondisi ketersediaan anggaran yang ada pada Satuan Kerja. - Melakukan pendampingan dan pengawasan secara intensif dan berkala kepada setiap TPM melalui monitoring progres penginputan data pada GO PKP dan menghubungi langsung masing-masing TPM agar segera menginput hasil pelaksanaan kegiatan Bedah Rumah. **JAMBI :** -

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	UNKER	TRIWULAN SEBELUMNYA (TW - II)			TRIWULAN SAAT INI (TW - III)	
				PERMASALAHAN	RENCANA TINDAK LANJUT	BUKTI TINDAK LANJUT (FOTO / LINK NOTULEN)	PERMASALAHAN	RENCANA TINDAK LANJUT TW-III
				di verifikasi, 2.874 unit direkomendasikan, dan 1.550 tidak direkomendasikan	Masyarakat (TPM). **JAMBI :** Percepatan penyelesaian inputing data verifikasi CPB, dengan: • Input/upload data CPB kedalam Applikasi GOPKP hingga lengkap sesuai persyaratan yang diminta dan segera kirim (submit) agar menambah progres. • Sehubungan dengan hasil verifikasi CPB eBSPS pertanggal 26/06/2026 yang direkomendasi baru mencapai 2.874 unit sedangkan yang tidak direkomendasi 1.550 unit, selesai 4.424 unit (86,0%) dari quota tahap II, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, maka dihimbau khususnya kepada Korkab dan TFL pada masing-masing Kabupaten/Kota untuk segera melengkapi kekurangan data yang diminta agar bisa segera dikirim (submit). • Koordinasi dengan pihak terkait terkait pemutakhiran data.		pekerjaan fisik terlambat - Terdapat Toko Pemenang PTT yang mengundurkan diri - Keterlambatan penerbitan SK Penetapan PB sehingga pekerjaan fisik terlambat	
4	Meningkatnya layanan dukungan manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan	Jumlah Layanan Umum	BALAI BKL JBI	**BALAI:** - TIDAK ADA **BENGKULU:** -TIDAK ADA **JAMBI :** -TIDAK ADA	**BALAI:** - TIDAK ADA **BENGKULU:** -TIDAK ADA **JAMBI :** -TIDAK ADA		**BALAI:** - TIDAK ADA **BENGKULU:** -TIDAK ADA **JAMBI :** -TIDAK ADA	**BALAI:** - TIDAK ADA **BENGKULU:** -TIDAK ADA **JAMBI :** -TIDAK ADA

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	UNKER	TRIWULAN SEBELUMNYA (TW - II)			TRIWULAN SAAT INI (TW - III)	
				PERMASALAHAN	RENCANA TINDAK LANJUT	BUKTI TINDAK LANJUT (FOTO / LINK NOTULEN)	PERMASALAHAN	RENCANA TINDAK LANJUT TW-III
5	Meningkatnya layanan dukungan manajemen Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	Jumlah Layanan Data dan Informasi	BALAI	**BALAI:** - telah dilakukan pendataan di kegiatan sinkron pusat daerah. sehingga blm dilaksanakan untuk turun ke daerah	**BALAI:** - segera di laksanakan		**BALAI:** - TIDAK ADA	**BALAI:** - TIDAK ADA
UNOR : DITJEN. PERUMAHAN PERKOTAAN								
1	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan perumahan perkotaan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	BALAI	**BALAI:** - TIDAK ADA	**BALAI:** - TIDAK ADA		**BALAI:** - TIDAK ADA	**BALAI:** - TIDAK ADA
		Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	BALAI BKL JBI	**BALAI:** - kegiatan fisik masih belum mulai pelaksanaan **BENGKULU:** TIDAK ADA **JAMBI :** - TIDAK ADA	**BALAI:** -menunggu jadwal pelaksanaan fisik **BENGKULU:** - TIDAK ADA **JAMBI : -** TIDAK ADA		**BALAI: -** TIDAK ADA **BENGKULU: -**TIDAK ADA **JAMBI : -**TIDAK ADA	**BALAI: -** TIDAK ADA **BENGKULU: -**TIDAK ADA **JAMBI : -**TIDAK ADA
2	Meningkatnya Akses Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perkotaan	Jumlah Kebijakan Penyelenggaraan Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perkotaan	BALAI	**BALAI:** - padatnya tugas dari personil kasi 2 sehingga terjadi reschedule jadwal pelaksanaan kegiatan di prov. jambi	**BALAI:** - padatnya tugas dari personil kasi 2 sehingga terjadi reschedule jadwal pelaksanaan kegiatan di prov. jambi		**BALAI:** - padatnya tugas dari personil kasi 2 sehingga terjadi reschedule jadwal pelaksanaan kegiatan di prov. jambi	**BALAI:** - akan dilaksanakan pada bulan september
3	Meningkatnya Akses Rumah Tangga yang Terfasilitasi Pembiayaan Perumahan di Wilayah Perkotaan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan Perkotaan	BALAI	BALAI: - padatnya tugas dari personil kasi 2 sehingga terjadi reschedule jadwal pelaksanaankegiatan di prov. jambi	**BALAI:** - padatnya tugas dari personil kasi 2 sehingga terjadi reschedule jadwal pelaksanaan kegiatan di prov. jambi		**BALAI:** - TIDAK ADA	**BALAI:** - TIDAK ADA

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	UNKER	TRIWULAN SEBELUMNYA (TW - II)			TRIWULAN SAAT INI (TW - III)	
				PERMASALAHAN	RENCANA TINDAK LANJUT	BUKTI TINDAK LANJUT (FOTO / LINK NOTULEN)	PERMASALAHAN	RENCANA TINDAK LANJUT TW-III
4	Meningkatnya Ketersediaan Rumah Baru Layak Huni di Perkotaan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perkotaan	BALAI	**BALAI:** -TIDAK ADA	**BALAI:** -TIDAK ADA		**BALAI:** - TIDAK ADA	**BALAI:** - TIDAK ADA
		Jumlah Unit Rumah Susun ASN/TNI/POLRI Perumahan Perkotaan	JBI	**JAMBI:** -• Kekurangan Tenaga Kerja (Man Power), dikarenakan keterlambatan proses pelaksanaan fisik dari periode sebelumnya. Maka proses percepatan terkendala kekurangan tenaga kerja (khususnya saat masuk ke pekerjaan Arsitektur serta Mekanikal, Elektrikal, dan Plumbing/MEP) • Faktor Cuaca (Hujan) Curah hujan menyebabkan potensi idle time (waktu tunggu/jeda pengerjaan) serta adanya ancaman air hujan yang masuk ke area lubang vertikal atau dak yang dapat merusak/menggenangi area kerja dan instalasi di lantai bawahnya. • Tertib Administrasi, Beberapa	**JAMBI:** • Penambahan Personel dan Sistem Shift: Tim manajemen konstruksi dan kontraktor terus mengevaluasi dan melakukan penambahan man power (seperti mendatangkan ekstra pekerja secara berkala). Selain itu, pekerjaan krusial seperti pembesian dan pengecoran dilakukan dengan sistem lembur (full-shift) hingga selesai untuk mengejar ketertinggalan durasi 1-2 hari lebih cepat. • Mitigasi Cuaca dan Perlindungan Material: Menjaga kelancaran suplai material 100% ready stock pada titik yang terdekat dengan lokasi kerja (seperti meletakkan semen, mortar, dan bata ringan langsung di area lantai 2). Untuk antisipasi cuaca, dilakukan pemasangan terpal pada area dak atas atau lubang vertikal lantai 2 untuk mencegah air hujan masuk		**JAMBI:** - Keterlambatan pekerjaan Instalasi Listrik dan Instalasi Pompa dan Penangkal Petir karena kurangnya tenaga kerja MEP yang berdampak kepada sequence pekerjaan selanjutnya. - Saat ini koordinasi antar tim masih ditemukan ketidakselarasan dalam alur informasi dan alur pekerjaan, yang berdampak pada efektivitas kerja. - Adanya kendala terhadap output sumur bor sehingga mengganggu aktivitas di lapangan. - Belum lengkapnya beberapa dokumen teknis guna mendukung tertib administrasi pelaksanaan pekerjaan.	**JAMBI:** - Memastikan area untuk beberapa item fabrikasi yang sudah siap di dilaksanakan pekerjaan pemasangan, seperti pompa, penangkal petir, Pintu engineering, dan Elektronika dll. -Penambahan tenaga kerja & mobilisasi ulang tenaga kerja spesialis seperti skill dan helper pekerjaan elektrikal dan pompa, vendor stainless steel dan railing tangga untuk dapat mengejar ketertinggalan progres dalam penyelesaian pekerjaan. - Segera melakukan perbaikan sumur bor agar tidak terjadi kendala dalam aktivitas pekerjaan dan serah terima pekerjaan. - Perlu dilakukan Manajemen Zona pekerjaan tanpa hambatan sisa material atau sampah di lokasi. - Pembenahan koordinasi & alur komunikasi : sebelum memulai pekerjaan mengadakan pertemuan singkat setiap pagi untuk menyelaraskan target harian, pembagian area kerja, dan hambatan teknis. - Menyusun daftar inventaris dokumen teknis

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	UNKER	TRIWULAN SEBELUMNYA (TW - II)			TRIWULAN SAAT INI (TW - III)	
				PERMASALAHAN	RENCANA TINDAK LANJUT	BUKTI TINDAK LANJUT (FOTO / LINK NOTULEN)	PERMASALAHAN	RENCANA TINDAK LANJUT TW-III
				kelengkapan dokumen teknis, administrasi, dan pencatatan pekerjaan di lapangan masih belum lengkap atau terlambat diselesaikan. • Kepatuhan K3 dan Handling Material, Diperlukan sinkronisasi antara alat, bahan, dan tenaga kerja secara presisi agar tidak membuang waktu (handling time tinggi) di proyek, serta masih perlunya pengawasan ketat terhadap kedisiplinan pekerja dalam memakai Alat Pelindung Diri (APD).	merusak instalasi lantai 1, serta menjaga area kerja tetap bebas dari genangan air dan lumpur. • Percepatan Dokumen Proyek: Mempercepat penyelesaian dan melengkapi dokumen-dokumen administrasi teknis yang sebelumnya tertunda agar memenuhi tertib administrasi proyek. • Penerapan Checklist dan K3 (Keselamatan Kerja): Mengadakan Toolbox Meeting dan sosialisasi rutin kepada seluruh pekerja tentang kewajiban memakai APD standar (helm, rompi, sepatu safety, dan sarung tangan). Hasilnya, pekerja mematuhi aturan standar keselamatan dan dilaporkan tidak ada insiden (zero accident). Prosedur ketat checklist pekerjaan juga selalu dilakukan sesaat sebelum dimulainya proses pengecoran agar tidak terjadi kesalahan konstruksi.			yang belum lengkap (Shop drawing, Approval material, dan metode kerja).
5	Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni melalui Peningkatan Kualitas Pembangunan Perumahan di Wilayah Perkotaan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan	BALAI	**BALAI:** - sudah dilaksanakan, menunggu proses di keuangan	**BALAI:** - sudah dilaksanakan, menunggu proses di keuangan		**BALAI:** - sudah dilaksanakan, menunggu proses di keuangan	**BALAI:** - menunggu bagian keuangan

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	UNKER	TRIWULAN SEBELUMNYA (TW - II)			TRIWULAN SAAT INI (TW - III)	
				PERMASALAHAN	RENCANA TINDAK LANJUT	BUKTI TINDAK LANJUT (FOTO / LINK NOTULEN)	PERMASALAHAN	RENCANA TINDAK LANJUT TW-III
		Jumlah Unit Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di Perkotaan	BKL JBI	**BENGKULU:** -Rendahnya persentase kelolosan hasil verifikasi Calon Penerima Bantuan BSPS **JAMBI :** - data CPB dari Instruksi Verifikasi banyak yang tidak direkomendasikan, berdasarkan total data per 26 September 2026, dari 4.424 Unit yang di verifikasi, 2.874 unit direkomendasikan, dan 1.550 tidak direkomendasikan	**BENGKULU:** - Data intsruksi verifikasi yang diterima Satuan Kerja melebihi alokasi unit yang terdapat pada DIPA yang mengakibatkan banyak data CPB yang tidak dapat ditetapkan sebagai penerima bantuan (SK PPK), sehingga terjadi gejolak pada Pemerintah Daerah. - Data intsruksi verifikasi yang diterima Satuan Kerja kurang dari alokasi unit yang terdapat pada DIPA Perkotaan yang mengakibatkan pengalihan pekerjaan fisik ke direktorat teknis lain. **JAMBI :** - Percepatan penyelesaian inputing data verifikasi CPB, dengan: • Input/upload data CPB kedalam Applikasi GOPKP hingga lengkap sesuai persyaratan yang diminta dan segera kirim (submit) agar menambah progres. • Sehubungan dengan hasil verifikasi CPB eBSPS pertanggal 26/06/2026 yang direkomendasi baru mencapai 2.874 unit sedangkan yang tidak direkomendasi 1.550 unit, selesai 4.424 unit (86,0%) dari quota tahap II, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, maka	**BENGKULU:** -Mengadakan sosialisasi pembaruan juknis yang tertuang dalam Permen PKP Nomor 6 Tahun 2026 tentang Bedah Rumah bersama instansi pengusul (Kementerian Kebudayaan, Kementerian Sosial, DPD RI, DPR RI dan Pemda) pada tanggal 19 Agustus 2026.	**BENGKULU:** - Keterlambatan penginputan data administrasi pada GO PKP oleh Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM). - Data intsruksi verifikasi yang diterima Satuan Kerja melebihi alokasi unit yangterdapat pada DIPA yang mengakibatkan banyak data CPB yang tidak dapat ditetapkan sebagai penerima bantuan (SK PPK), sehingga terjadi gejolak pada Pemerintah Daerah. **JAMBI :** - Banyak data hasil verifikasi yang tidak direkomendasikan sebagai penerima bantuan - Pencarian data pengganti CPB membutuhkan waktu	**BENGKULU:** - Melakukan pendampingan dan pengawasan secara intensif dan berkala kepada setiap TPM melalui monitoring progres penginputan data pada GO PKP dan menghubungi langsung masing-masing TPM agar segera menginput hasil pelaksanaan kegiatan Bedah Rumah. -Melaksanakan realisasi anggaran BSPS atau Bedah Rumah padad DIPA Perkotaan ke wilayah Kawasan Permukiman dan Perdesaan. **JAMBI :** -TIDAK ADA

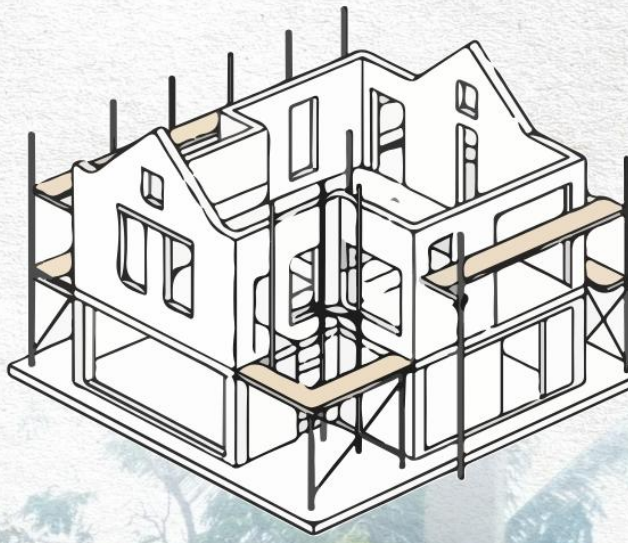
NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	UNKER	TRIWULAN SEBELUMNYA (TW - II)			TRIWULAN SAAT INI (TW - III)	
				PERMASALAHAN	RENCANA TINDAK LANJUT	BUKTI TINDAK LANJUT (FOTO / LINK NOTULEN)	PERMASALAHAN	RENCANA TINDAK LANJUT TW-III
					dihimbau khususnya kepada Korkab dan TFL pada masing-masing Kabupaten/Kota untuk segera melengkapi kekurangan data yang diminta agar bisa segera dikirim (submit). • Koordinasi dengan pihak terkait terkait pemutakhiran data.			
6	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan	Jumlah Layanan Umum	BALAI BKL JBI	**BALAI:** - TIDAK ADA **BENGKULU:** -TIDAK ADA **JAMBI :** -TIDAK ADA	**BALAI: TIDAK ADA** **BENGKULU: - TIDAK ADA** **JAMBI : -TIDAK ADA**		**BALAI:** - TIDAK ADA **BENGKULU:** -TIDAK ADA **JAMBI :** -TIDAK ADA	**BALAI:** - TIDAK ADA **BENGKULU:** -TIDAK ADA **JAMBI :** -TIDAK ADA
		Jumlah Layanan Data dan Informasi	BALAI	**BALAI:** -TIDAK ADA	**BALAI:** -TIDAK ADA		**BALAI:** - TIDAK ADA	**BALAI:** - TIDAK ADA
		Jumlah Layanan BMN	BALAI	**BALAI:** -TIDAK ADA	**BALAI:** -TIDAK ADA		**BALAI:** - TIDAK ADA	**BALAI:** - TIDAK ADA
UNOR : DITJEN. TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO								
1	Meningkatnya dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas	BALAI	**BALAI:** -TIDAK ADA	**BALAI:** -TIDAK ADA		**BALAI:** - TIDAK ADA	**BALAI:** - TIDAK ADA
2	Meningkatnya dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi	BALAI	**BALAI:** - menunggu kebijakan dari pusat terkait kegiatan SMAP	**BALAI:** - menunggu kebijakan dari pusat terkait kegiatan SMAP		**BALAI:** - menunggu kebijakan dari pusat terkait kegiatan SMAP	**BALAI:** - Menunggu arahan dari pusat

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	UNKER	TRIWULAN SEBELUMNYA (TW - II)			TRIWULAN SAAT INI (TW - III)	
				PERMASALAHAN	RENCANA TINDAK LANJUT	BUKTI TINDAK LANJUT (FOTO / LINK NOTULEN)	PERMASALAHAN	RENCANA TINDAK LANJUT TW-III
3	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko perumahan dan kawasan permukiman	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	BALAI	**BALAI:** - menunggu kegiatan berjalan (BSPS, Kumuh, Rusus)	**BALAI:** - TIDAK ADA		**BALAI**: - TIDAK ADA	**BALAI**: - TIDAK ADA

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN

LAMPIRAN



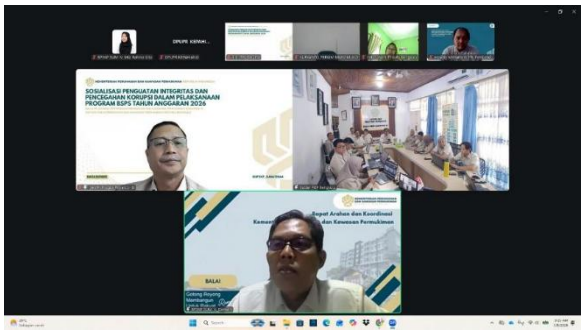


LAMPIRAN

Lampiran 1. Dokumentasi Kegiatan Triwulan III

NO	KEGIATAN	DOKUMENTASI
1	Bengkulu, 01 Juli 2026 Rapat Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan II Satker PKP Provinsi Bengkulu	
	Jambi, 01 Juli 2026 Monev Kabalai dalam Rangka Test Case SCM I Rusun	
	Jambi, 02 Juli 2026 Pengecekan Material Pekerjaan Pintu Dan Jendela Rumah Susun MA RI Jambi	

NO	KEGIATAN	DOKUMENTASI
	Bengkulu, 03 Juli 2026 Pelatihan Budaya Pelayanan Prima, Giat Senam Sehat, dan Sosialisasi Produk Tabungan Emas, Cicil Emas, Tabungan Haji dan Pembiayaan BSI di Lingkungan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera IV	
	Bengkulu, 06 Juli 2026 Apel pagi di Lingkungan Satker PKP Provinsi Bengkulu	
	Bengkulu, 06 Juli 2026 Koordinasi Program Sertifikat Tanah Gratis penerima BSPS Tahun 2026 bersama Kanwil BPN Bengkulu dan Dinas Perkim Provinsi Bengkulu	
	Jambi, 06 Juli 2026 Rapat Evaluasi Test Case SCM I	

NO	KEGIATAN	DOKUMENTASI
	Kab. Merangin, 06-07 Juli 2026 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanan Kegiatan Bantuan Stimulan Perumhan Swadaya (BSPS) Dikabupaten Marangin	
	Bengkulu, 08 April 2026 Sosialisasi Penguatan Integritas dan Pencegahan Korupsi dalam Pelaksanaan Program BSPS Tahun Anggaran 2026	
	Jambi, 08 Juli 2026 Monev Rusun Pasca Test Case SCM I	
	Jambi, 08-11 Juli 2026 Konsolidasi Pelaporan Keuangan Dan BMN Semester I Tahun Anggaran 2026	

NO	KEGIATAN	DOKUMENTASI
	Jambi, 09 Juli 2026 Menghadiri Pemilihan Toko Terbuka (PTT) BSPS 2026	
	Jambi, 14 Juli 2026 Kunjungan Monev Subdit Wil I dan TA MK	
	Bengkulu, 15 Juli 2026 Rapat Percepatan BSPS Provinsi Bengkulu	
	Bengkulu, 15 Juli 2026 Persiapan Pembekalan mobilisasi TFL Kegiatan BSPS	

NO	KEGIATAN	DOKUMENTASI
	Kab. Muaro Jambi, 15 Juli 2026 Monitoring dan Evaluasi BSPS di Kab. Muaro Jambi	
	Kab. Tanjab Timur, 16 Juli 2026 Monitoring dan Evaluasi Persiapan Pelaksanaan Pembangunan Rumah Bersanitasi Layak Kawasan Nipah Panjang II Kab.Tanjung Jabung Timur	
	Kab. Bungo, Tebo, 16-18 Juli 2026 Monitoring dan Evaluasi BSPS di Kabupaten Bungo dan Tebo	
2	Kab. Seluma, 17 Juli 2026 Sosialisasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahap III Tahun Anggaran 2026 di Kabupaten Seluma	

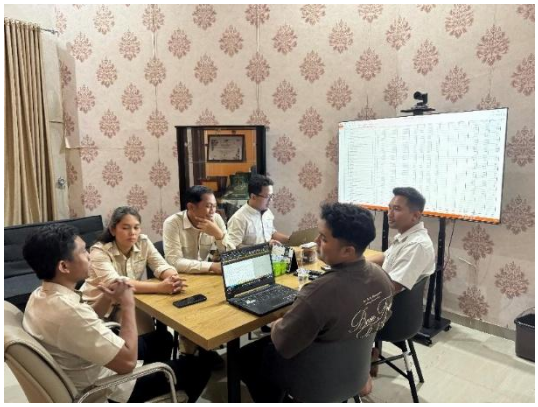
NO	KEGIATAN	DOKUMENTASI
	Kab. Bengkulu Utara, 17 Juli 2026 Verifikasi Teknis Calon Penerima Bantuan BSPS di Kabupaten Bengkulu Utara	
	Kab. Bungo, 17-18 Juli 2026 Monitoring dan Evaluasi BSPS di Kabupaten Bungo	
	Kab. Muko Muko, 20-22 Juli 2026 Verifikasi Teknis Calon Penerima Bantuan BSPS di Kabupaten Mukomuko.	
	Jambi, 20 Juli 2026 Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Rumah Susun Mahkamah Agung RI Jambi	

NO	KEGIATAN	DOKUMENTASI
	Kab. Batanghari, 21 Juli 2026 Monitoring dan Evaluasi BSPS di Kabupaten Batang Hari	
	Kab. Seluma, 24 Juli 2026 Persiapan verifikasi teknis di Desa Sumber Makmur Kabupaten Seluma	
	Jambi, 24 Juli 2026 *Talkshow* Layanan Klinik PKP di TVRI Jambi	
	Kab. Muara Jambi, 22 Juli 2026 Monitoring dan Evaluasi BSPS di Kabupaten ,Muara Jambi	

NO	KEGIATAN	DOKUMENTASI
	Kota Jambi, 22 Juli 2026 Monitoring dan Evaluasi Rusun MA	
	Kota Sungai Penuh, 23-25 Juli 2026 Monitoring dan Evaluasi BSPS di Kota Sungai Penuh	
	Kab. Kerinci, 23-25 Juli 2026 Monitoring dan Evaluasi BSPS di Kab. Kerinci	
	Kab. Rejang Lebong, 27 Juli 2026 Verifikasi Teknis Calon Penerima Bantuan BSPS Pengganti ke-13 di Kabupaten Rejang Lebong	

NO	KEGIATAN	DOKUMENTASI
6.	Jambi, 03 Agustus 2026 Apel pagi di Lingkungan BP3KP Sumatera IV dan Satker PKP Provinsi Bengkulu	 
	Jambi, 04 Agustus 2026 Rapat Pemantauan dan pendampingan Tata kelola serta Pengendalian Risiko Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Rumah Susun MA RI Jambi TA 2026	
	Kab. Rejang Lebong, 04 Agustus 2026 Pelaksanaan Verifikasi Teknis Calon Penerima Bantuan BSPS di Kabupaten Rejang Lebong Tahap XIV	
	Kab. Muaro Jambi, 05 Agustus 2026 Pertemuan Penerima BSPS Desa Tangkit Bersama Komisi V DPR RI dalam Rangka Reses Masa Persidangan ke-5	

NO	KEGIATAN	DOKUMENTASI
	Bengkulu, 06 Agustus 2026 Sosialisasi Peraturan Menteri dan Petunjuk Teknis BedahRumah kepada Bank Penyalur	
	Kota Jambi, 10 Agustus 2026 Penyampaian Hasil Kegiatan Monitoring Progress Pekerjaan Pembangunan Rumah Susun MA RI Jambi	
10.	Jambi, 11 Agustus 2026 Sosialisasi Budaya Sadar Risiko Pengadaan Barang Jasa Pemerintah	 
	Kab. Muaro Jambi, 12 Agustus 2026 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan BSPS di Kabupaten Muaro Jambi	

NO	KEGIATAN	DOKUMENTASI
	Kota Jambi, 12 Agustus 2026 Rapat Penyedia Jasa Bersama Peneliti Kontrak (Rabu)	
	Jambi, 14 Agustus 2026 Pemasangan Spanduk Hari Besar Kemerdekaan RI ke 81	
	Jambi, 14 Agustus 2026 Pengadaan Kaos Hari Besar Kemerdekaan RI ke 81	
	Kab. Tanjab Timur, 14 Agustus 2026 Pelengkapan RC Pengumpulan Data dan Informasi Penanganan Sanitasi di Kab. Tanjab Timur	

NO	KEGIATAN	DOKUMENTASI
	Bengkulu, 17 Agustus 2026 Upacara Peringatan HUT RI ke 81 di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Bengkulu	
	Bengkulu, 19 Agustus 2026 Sosialisasi Permen PKP Nomor 6 Tahun 2026 tentang Bedah Rumah dan Program Sertifikasi Tanah Lintas Sektor (Lintor) bagi MBR	
	Bengkulu, 20 Agustus 2026 Rapat Verifikasi Bantuan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan di Kota Bengkulu	
	Kab. Merangin, 20-22 Agustus 2026 monitoring dan evaluasi BSPS di Kabupaten Merangin	

NO	KEGIATAN	DOKUMENTASI
	Kab. tebo, 24 Agustus 2026 Monitoring Dan Evaluasi Kegiatan BSPS Di Kabupaten Tebo	
	Jambi, 26 Agustus 2026 Rapat Pemantauan dan pendampingan Tata kelola serta Pengendalian Risiko Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Rumah Susun MA RI Jambi TA 2026	
	Jakarta, 25-28 Agustus 2026 Bimbingan Teknik Pagu Anggaran TA 2027di Lingkungan Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan	
	Depok, 27-30 Agustus 2026 Rapat Koordinasi Teknis dan Pemantauan dan Evaluasi (Rakornistusi) Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) TA 2026	

NO	KEGIATAN	DOKUMENTASI
	Jambi, 01 September 2026 Sosialisasi Layanan Klinik PKP bersama DPD APERSI Provinsi Jambi	
	Bengkulu, 07 September 2026 Apel pagi di Lingkungan Satker PKP Provinsi Bengkulu	
	Bengkulu, 08 September 2026 Sosialisasi Layanan Klinik PKP bersama REI Provinsi Jambi	
	Bengkulu, 08 September 2026 Rapat Koordinasi Persiapan Verfal Alokasi Bedah Rumah usulan Zulkifi Hasan sebanyak 205 unit di Kabupaten Seluma	

NO	KEGIATAN	DOKUMENTASI
	Jambi, 08 September 2026 Monev Rusun Bersama Plt. Dir Pembangunan Perkotaan dan Kabalai	
	Jambi, 09 September 2026 Rapat Verifikasi Faktual Bedah Rumah Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan	
	Kab. Seluma, 09 September 2026 Mendampingi Pelaksanaan Verifikasi Teknis Kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Tahun Anggaran 2026 di Kabupaten Seluma	
	Bengkulu, 9-12 September 2026 Mendampingi Pemilihan Toko Terbuka (PTT) dan Monev Bedah Rumah di Kabupaten Mukomuko dan Bengkulu Utara	

NO	KEGIATAN	DOKUMENTASI
	Jakarta, 16-17 September 2026 Menghadiri Undangan RDP Komisi V DPR RI	
	Kab. Batanghari, 16 September 2026 Pengumpulan Data dan Informasi Pembangunan Rumah Khusus di Kab. Batanghari TA 2026	
	Kab. Batanghari, 16 September 2026 MC-0 Rusus Batang Hari	
	Kota Jambi, 16 September 2026 PCM Fisik Rusus Batanghari 1	

NO	KEGIATAN	DOKUMENTASI
	Kota Jambi, 16 September 2026 PCM Fisik Rusus Batanghari	
	Bengkulu, 21 September 2026 Serah Terima Pekerjaan Jabatan Pengawas di Lingkungan Balai P3KP Sumatera IV	
	Kab. Batanghari, 23 September 2026 Sosialisasi Layanan Klinik PKP kepada Masyarakat Kabupaten Batang Hari	
	Kab. Ma. Jambi, 24-25 September 2026 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Bedah Rumah Kabupaten Batanghari TA 2026	

NO	KEGIATAN	DOKUMENTASI
	Bengkulu, 24 September 2026 Mendampingi Acara Peletakan Batu Pertama Kegiatan Perbaikan RTLH TA 2026 Kota Bengkulu	
	Kab. Seluma, 25 September 2026 Monitoring dan Evaluasi Bedah Rumah di Kabupaten Seluma	
	Jambi, 25 September 2026 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	
	Kab. Ma. Jambi, 28-29 September 2026 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Bedah Rumah di Kabupaten Muara Jambi	 

NO	KEGIATAN	DOKUMENTASI
	Bengkulu, 30 September 2026 Sosialisasi Kegiatan Sertifikasi Lintas Sektor Tahun 2026 bersama Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bengkulu	

Lampiran 2. PK Awal DIPA Sekretariat Jenderal yang di gunakan sebagai dasar penilaian Kinerja TW III



PK AWAL

KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Yenni Sofyan Mora**
Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera IV

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Didyk Choiroel**
Jabatan : Sekretaris Jenderal

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 10 April 2026

Pihak Kedua
Didyk Choiroel
NIP. 197104161992011001

Pihak Pertama
Yenni Sofyan Mora
NIP. 198104212008122001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA IV
SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET
Program Dukungan Manajemen				
1	Meningkatnya layanan dukungan manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera IV	1	Jumlah Layanan Umum	3 Layanan
		2	Jumlah Layanan Perkantoran	3 Layanan
		3	Jumlah Layanan Sarana Internal	42 unit

KEGIATAN	PAGU APBN	
1 Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera IV	Rp	1.039.332.000,00
2 Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bengkulu	Rp	505.787.000,00
3 Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jambi	Rp	455.072.000,00
	Rp	2.000.191.000,00

Jakarta, 10 April 2026

SEKRETARIS JENDERAL
DIDYK CHOIROEL

KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA IV
YENNI SOFYAN MORA

Draft PK Revisi berdasarkan Revisi DIPA Sekretariat Jenderal yang di gunakan sebagai dasar penilaian Kinerja TW III



PK REVISI

KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Yenni Sofyan Mora**
Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera IV

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Didyk Choiroel**
Jabatan : Sekretaris Jenderal

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

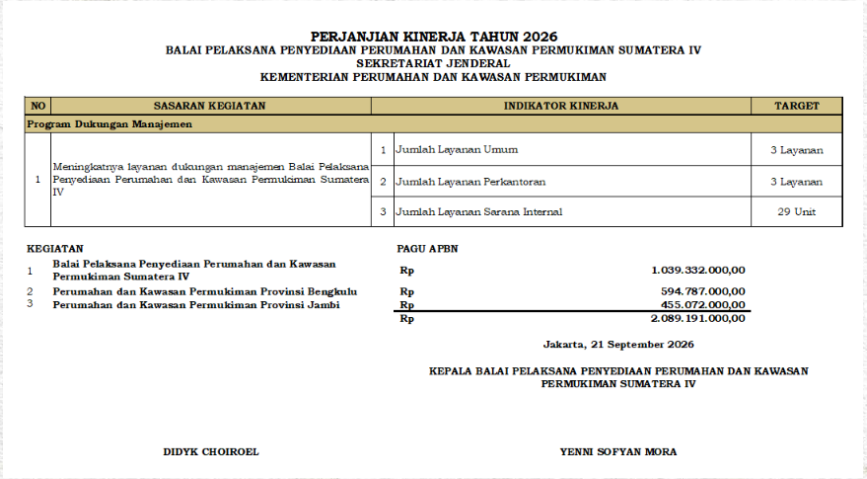
Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 21 September 2026

Pihak Kedua
Didyk Choiroel
NIP. 197104161992011001

Pihak Pertama
Yenni Sofyan Mora
NIP. 197509222002121003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA IV
SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET
Program Dukungan Manajemen				
1	Meningkatnya layanan dukungan manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera IV	1	Jumlah Layanan Umum	3 Layanan
		2	Jumlah Layanan Perkantoran	3 Layanan
		3	Jumlah Layanan Sarana Internal	29 Unit

KEGIATAN	PAGU APBN	
1 Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera IV	Rp	1.039.332.000,00
2 Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bengkulu	Rp	594.787.000,00
3 Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jambi	Rp	455.072.000,00
	Rp	2.089.191.000,00

Jakarta, 21 September 2026

KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA IV

DIDYK CHOIROEL

YENNI SOFYAN MORA

Lampiran 3. PK Awal DIPA Ditjen. Kawasan Permukiman yang digunakan sebagai dasar penilaian Kinerja TW III



AWAL

KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Yenni Sofyan Mora**
Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera IV

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Fitrah Nur**
Jabatan : Direktur Jenderal Kawasan Permukiman

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2026

Pihak Kedua
Fitrah Nur
NIP. 196704191994031003

Pihak Pertama
Yenni Sofyan Mora
NIP. 198104212008122001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA IV
DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET
Prorgam Perumahan dan Kawasan Permukiman				
1	Terselenggaranya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam mendukung penyediaan rumah layak huni	1	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	1 Dokumen
		2	Jumlah Laporan Penyusunan Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman	1 Rekomendasi Kebijakan
2	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni di kawasan permukiman	1	Jumlah Dokumen Teknis Penyiapan Penanganan Kumuh dan Pengembangan Kawasan Permukiman	1 Dokumen
Prorgam Dukungan Manajemen				
1	Meningkatnya layanan dukungan manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman	1	Jumlah Layanan Umum	3 Layanan
		2	Jumlah Data dan Informasi	1 Layanan
		3	Jumlah Layanan BMN	1 Layanan

KEGIATAN		PAGU APBN	
1	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera IV	Rp	310.065.000,00
2	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bengkulu	Rp	45.812.000,00
3	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jambi	Rp	35.339.000,00
		Rp	391.216.000,00

Jakarta, Maret 2026

DIREKTUR JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
FITRAH NUR

KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA IV
YENNI SOFYAN MORA

PK Revisi DIPA Ditjen. Kawasan Permukiman yang digunakan sebagai dasar penilaian Kinerja TW III



REVISI

KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Yenni Sofyan Mora**
Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera IV

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Fitrah Nur**
Jabatan : Direktur Jenderal Kawasan Permukiman

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

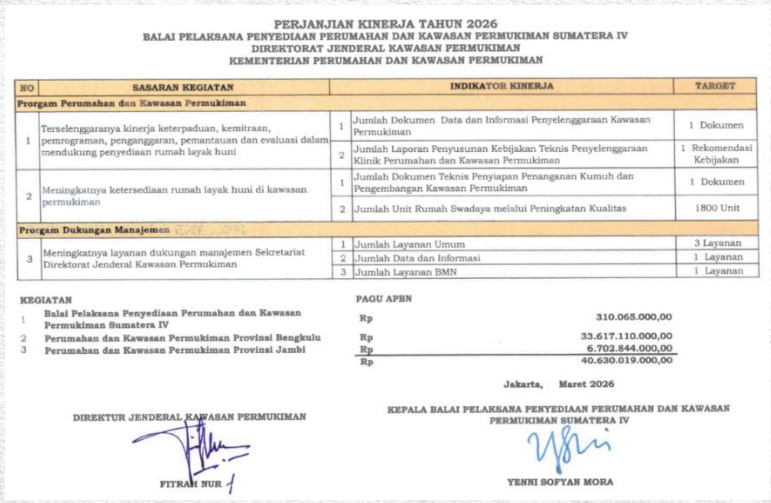
Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

3. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
4. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2026

Pihak Kedua
Fitrah Nur
NIP. 196704191994031003

Pihak Pertama
Yenni Sofyan Mora
NIP. 198104212008122001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA IV
DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET
Prorgam Perumahan dan Kawasan Permukiman				
1	Terselenggaranya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam mendukung penyediaan rumah layak huni	1	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	1 Dokumen
		2	Jumlah Laporan Penyusunan Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman	1 Rekomendasi Kebijakan
2	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni di kawasan permukiman	1	Jumlah Dokumen Teknis Penyiapan Penanganan Kumuh dan Pengembangan Kawasan Permukiman	1 Dokumen
		2	Jumlah Unit Rumah Swadaya melalui Peningkatan Kualitas	1800 Unit
Prorgam Dukungan Manajemen				
3	Meningkatnya layanan dukungan manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman	1	Jumlah Layanan Umum	3 Layanan
		2	Jumlah Data dan Informasi	1 Layanan
		3	Jumlah Layanan BMN	1 Layanan

KEGIATAN		PAGU APBN	
1	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera IV	Rp	310.065.000,00
2	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bengkulu	Rp	33.617.110.000,00
3	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jambi	Rp	6.702.844.000,00
		Rp	40.630.019.000,00

Jakarta, Maret 2026

DIREKTUR JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
FITRAH NUR

KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA IV
YENNI SOFYAN MORA

Draft PK Revisi berdasarkan Revisi DIPA Ditjen. Kawasan Permukiman yang digunakan sebagai dasar penilaian Kinerja TW III

PK REVISI 6

KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Yenni Sofyan Mora**
Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera IV

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Fitrah Nur**
Jabatan : Direktur Jenderal Kawasan Permukiman

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 20 Agustus 2026

Pihak Kedua	Pihak Pertama
Fitrah Nur	**Yenni Sofyan Mora**
NIP. 196704191994031003	NIP. 198104212008122001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA IV
DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET
Progam Perumahan dan Kawasan Permukiman				
1	Terselenggaranya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam mendukung penyediaan rumah layak huni	1	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	1 Dokumen
		2	Jumlah Laporan Penyusunan Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman	1 Rekomendasi Kebijakan
2	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni di kawasan permukiman	1	Jumlah Dokumen Teknis Penyiapan Penanganan Kumuh dan Pengembangan Kawasan Permukiman	1 Dokumen
		2	Jumlah Unit Rumah Swadaya melalui Peningkatan Kualitas	1930 Unit
		3	Jumlah Unit Rumah yang Memiliki Akses Sanitasi Layak (PK)	200 Unit
3	Meningkatnya luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu	1	Jumlah Permukiman Kumuh yang Ditangani Secara Terpadu	18,13 Hektar
Progam Dukungan Manajemen				
4	Meningkatnya layanan dukungan manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman	1	Jumlah Layanan Umum	3 Layanan
		2	Jumlah Data dan Informasi	1 Layanan
		3	Jumlah Layanan BMN	1 Layanan

	KEGIATAN	PAGU APBN
1	**Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera IV**	**Rp 194.339.000,00**
2	**Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bengkulu**	**Rp 33.238.532.000,00**
3	**Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jambi**	**Rp 17.011.892.000,00**
		Rp 50.444.763.000,00

Jakarta, 20 Agustus 2026

DIREKTUR JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN	KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA IV
FITRAH NUR	**YENNI SOFYAN MORA**

Lampiran 4. PK Awal DIPA Ditjen. Perumahan Perdesaan yang digunakan sebagai dasar penilaian Kinerja TW III



PK AWAL

KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Yenni Sofyan Mora**
Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera IV

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Imran**
Jabatan : Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

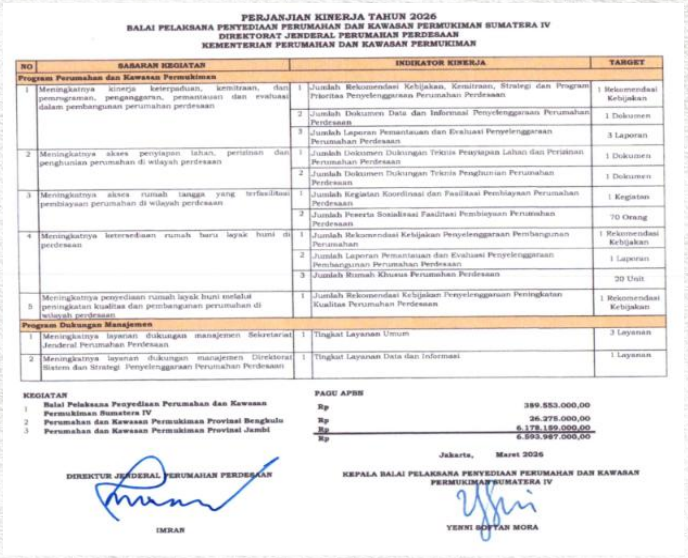
Jakarta, Maret 2026

Pihak Kedua

Imran
NIP. 197310261993021001

Pihak Pertama

Yenni Sofyan Mora
NIP. 19810421 200812 2 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA IV
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman				
1	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, dan pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan perumahan perdesaan	1	Jumlah Rekomendasi Kebijakan, Kemitraan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1 Rekomendasi Kebijakan
		2	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1 Dokumen
		3	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	3 Laporan
2	Meningkatnya akses penyiapan lahan, perolehan dan penghunian perumahan di wilayah perdesaan	1	Jumlah Dokumen Dukungan Teknis Penyiapan Lahan dan Perolehan Perumahan Perdesaan	1 Dokumen
		2	Jumlah Dokumen Dukungan Teknis Penghunian Perumahan Perdesaan	1 Dokumen
3	Meningkatnya akses rumah tangga yang terfasilitasi pembiayaan perumahan di wilayah perdesaan	1	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pembiayaan Perumahan Perdesaan	1 Kegiatan
		2	Jumlah Peserta Sosialisasi Fasilitasi Pembiayaan Perumahan	70 Orang
4	Meningkatnya ketersediaan rumah baru layak huni di perdesaan	1	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan	1 Rekomendasi Kebijakan
		2	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perdesaan	1 Laporan
		3	Jumlah Rumah Khusus Perumahan Perdesaan	20 Unit
5	Meningkatnya penyediaan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas dan pembangunan perumahan di wilayah perdesaan	1	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan	1 Rekomendasi Kebijakan
Program Dukungan Manajemen				
1	Meningkatnya layanan dukungan manajemen Sekretariat Jenderal Perumahan Perdesaan	1	Tingkat Layanan Umum	3 Layanan
2	Meningkatnya layanan dukungan manajemen Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1	Tingkat Layanan Data dan Informasi	1 Layanan

KEGIATAN	PAGU APBN
1 Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera IV	Rp 389.553.000,00
2 Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bengkulu	Rp 26.275.000,00
3 Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jambi	Rp 6.178.189.000,00
	Rp 6.593.967.000,00

Jakarta, Maret 2026

DIREKTUR JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN

IMRAN

KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA IV

YENNI SOFYAN MORA

PK Revisi DIPA Ditjen. Perumahan Perdesaan yang digunakan sebagai dasar penilaian Kinerja TW III



PK REVISI 1

KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Yenni Sofyan Mora**
Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera IV

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Imran**
Jabatan : Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2026

Pihak Kedua

Imran
NIP. 197310261993021001

Pihak Pertama

Yenni Sofyan Mora
NIP. 19810421 200812 2 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA IV
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman				
1	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, dan pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan perumahan perdesaan	1	Jumlah Rekomendasi Kebijakan, Kemitraan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1 Rekomendasi Kebijakan
		2	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1 Dokumen
		3	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	2 Laporan
2	Meningkatnya ketersediaan rumah baru layak huni di perdesaan	1	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan	1 Rekomendasi Kebijakan
		2	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perdesaan	1 Laporan
		3	Jumlah Rumah Khusus Perumahan Perdesaan	20 Unit
3	Meningkatnya penyediaan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas dan pembangunan perumahan di wilayah perdesaan	1	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan	1 Rekomendasi Kebijakan
		2	Jumlah Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di Perdesaan	3600 Unit
Program Dukungan Manajemen				
1	Meningkatnya layanan dukungan manajemen Sekretariat Jenderal Perumahan Perdesaan	1	Jumlah Layanan Umum	3 Layanan
2	Meningkatnya layanan dukungan manajemen Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1	Jumlah Layanan Data dan Informasi	1 Layanan

KEGIATAN	PAGU APBN
1 Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera IV	Rp 302.560.000,00
2 Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bengkulu	Rp 26.334.632.000,00
3 Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jambi	Rp 59.300.255.000,00
	Rp 85.937.447.000,00

Jakarta, Maret 2026

DIREKTUR JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN

IMRAN

KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA IV

YENNI SOFYAN MORA

Draft PK Revisi berdasarkan Revisi DIPA Ditjen. Perumahan Perdesaan yang digunakan sebagai dasar penilaian Kinerja TW III

PK REVISI 4

KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Yenni Sofyan Mora**
Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera IV

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Rini Dyah Mawarty**
Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 20 Agustus 2026

Pihak Kedua

Rini Dyah Mawarty
NIP. 19701215 199803 2 007

Pihak Pertama

Yenni Sofyan Mora
NIP. 19810421 200812 2 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA IV
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman				
1	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, dan pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan perumahan perdesaan	1	Jumlah Rekomendasi Kebijakan, Kemitraan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1 Rekomendasi Kebijakan
		2	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1 Dokumen
		3	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	2 Laporan
2	Meningkatnya ketersediaan rumah baru layak huni di perdesaan	1	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan	1 Rekomendasi Kebijakan
		2	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perdesaan	1 Laporan
		3	Jumlah Rumah Khusus Perumahan Perdesaan	48 Unit
3	Meningkatnya penyediaan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas dan pembangunan perumahan di wilayah perdesaan	1	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan	1 Rekomendasi Kebijakan
		2	Jumlah Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di Perdesaan	5.937 Unit
Program Dukungan Manajemen				
1	Meningkatnya layanan dukungan manajemen Sekretariat Jenderal Perumahan Perdesaan	1	Jumlah Layanan Umum	3 Layanan
2	Meningkatnya layanan dukungan manajemen Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1	Jumlah Layanan Data dan Informasi	1 Layanan

KEGIATAN		PAGU APBN	
1	**Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera IV**	Rp	180.090.000,00
2	**Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bengkulu**	Rp	29.869.370.000,00
3	**Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jambi**	Rp	81.286.320.000,00
		Rp	111.335.780.000,00

Jakarta, 20 Agustus 2026

Plt. DIREKTUR JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN

RINI DYAH MAWARTY

KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA IV

YENNI SOFYAN MORA

XXX

Lampiran 5. PK Awal DIPA Ditjen. Perumahan Perkotaan yang digunakan sebagai dasar penilaian Kinerja TW III

KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Yenni Sofyan Mora**
Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera IV

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Sri Haryati**
Jabatan : Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 11 Maret 2026

Pihak Kedua	Pihak Pertama
Sri Haryati	**Yenni Sofyan Mora**
NIP. 197107071997032004	NIP. 198104212008122001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA IV
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				
1.	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, pengenggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan perumahan perkotaan	1.	Jumlah Rekomendasi Kebijakan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan
		2.	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	3 Laporan
2.	Meningkatnya Akses Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perkotaan	1.	Jumlah Kebijakan Penyelenggaraan Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan
3.	Meningkatnya Akses Rumah Tangga yang Terfasilitasi Pembiayaan Perumahan di Wilayah Perkotaan	1.	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan Perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan
4.	Meningkatnya Ketersediaan Rumah Baru Layak Huni di Perkotaan	1.	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan
		2.	Jumlah Unit Rumah Susun ASN/TNI/POLRI Perumahan Perkotaan	12 Unit
5.	Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni melalui Peningkatan Kualitas Pembangunan Perumahan di Wilayah Perkotaan	1.	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN				
1.	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan	1.	Jumlah Layanan Umum	3 Layanan
		2.	Jumlah Layanan Data dan Informasi	1 Layanan
		3.	Jumlah Layanan BMN	1 Layanan

KEGIATAN	PAGU APBN	
1. Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera IV	Rp	400.165.000,00
2. Perumahan dan Kawasan Permukiman Bengkulu	Rp	24.022.000,00
3. Perumahan dan Kawasan Permukiman Jambi	Rp	7.951.869.000,00
	Rp	8.376.056.000,00

Jakarta, 11 Maret 2026

DIREKTUR JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN	KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA IV
SRI HARYATI	YENNI SOFYAN MORA

Draft PK Revisi berdasarkan Revisi DIPA Ditjen. Perumahan Perkotaan yang digunakan sebagai dasar penilaian Kinerja TW III

KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Yenni Sofyan Mora**
Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera IV

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Sri Haryati**
Jabatan : Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 21 September 2026

Pihak Kedua	Pihak Pertama
Sri Haryati	**Yenni Sofyan Mora**
NIP. 197107071997032004	NIP. 198104212008122001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA IV
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				
1.	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, pengenggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan perumahan perkotaan	1.	Jumlah Rekomendasi Kebijakan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan
		2.	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	3 Laporan
2.	Meningkatnya Akses Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perkotaan	1.	Jumlah Kebijakan Penyelenggaraan Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan
3.	Meningkatnya Akses Rumah Tangga yang Terfasilitasi Pembiayaan Perumahan di Wilayah Perkotaan	1.	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan Perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan
4.	Meningkatnya Ketersediaan Rumah Baru Layak Huni di Perkotaan	1.	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan
		2.	Jumlah Unit Rumah Susun ASN/TNI/POLRI Perumahan Perkotaan	12 Unit
5.	Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni melalui Peningkatan Kualitas Pembangunan Perumahan di Wilayah Perkotaan	1.	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan
		2.	Jumlah Unit Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di Perkotaan	2.760 Unit
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN				
1.	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan	1.	Jumlah Layanan Umum	3 Layanan
		2.	Jumlah Layanan Data dan Informasi	1 Layanan
		3.	Jumlah Layanan BMN	1 Layanan

KEGIATAN	PAGU APBN	
1. Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera IV	Rp	255.841.000,00
2. Perumahan dan Kawasan Permukiman Bengkulu	Rp	21.899.502.000,00
3. Perumahan dan Kawasan Permukiman Jambi	Rp	42.337.154.000,00
	Rp	64.492.497.000,00

Jakarta, 21 September 2026

DIREKTUR JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN	KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA IV
SRI HARYATI	YENNI SOFYAN MORA

Lampiran 6. PK Awal DIPA Ditjen. Tata Kelola dan Pengendalian Risiko yang digunakan sebagai dasar penilaian Kinerja TW III

KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Nurmala**
Jabatan : Plt. Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera IV

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Azis Andriansyah**
Jabatan : Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 28 Januari 2026

Pihak Kedua	Pihak Pertama
Azis Andriansyah	Nurmala
NRP. 77050672	NIP. 197606112010012004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA IV
DIREKTORAT JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel	1	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas	1 Rekomendasi Kebijakan
2	Meningkatnya dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman	2	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi	2 Rekomendasi Kebijakan
3	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi dalam penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko perumahan dan kawasan permukiman	3	Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko	1 Rekomendasi Kebijakan

KEGIATAN	PAGU APBN
1 Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rp 157,167,000.00

Jakarta, 28 Januari 2026

DIREKTUR JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO	Plt. KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA IV
AZIS ANDRIANSYAH	NURMALA

Draft PK Revisi berdasarkan Revisi DIPA Ditjen. Tata Kelola dan Pengendalian Risiko yang digunakan sebagai dasar penilaian Kinerja TW III

PK REVISI 1

KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Yenni Sofyan Mora**
Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera IV

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Roberia**
Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 13 Mei 2026

Pihak Kedua	Pihak Pertama
Roberia	Yenni Sofyan Mora
NIP. 197004232005011007	NIP. 19810421 200812 2 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA IV
DIREKTORAT JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				
1.	Meningkatnya dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel	1.	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas	1 Rekomendasi Kebijakan
2.	Meningkatnya dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman	1.	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi	2 Rekomendasi Kebijakan
3.	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko perumahan dan kawasan permukiman	1.	Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko	1 Laporan

KEGIATAN	PAGU APBN
1. Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera IV	Rp 79.894.000,00

Jakarta, 13 Mei2026

Plt. DIREKTUR JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO	KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA IV
ROBERIA	YENNI SOFYAN MORA